



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR ...TAHUN ...

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAN DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2026-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dikelola secara bijaksana dengan memperhatikan nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa sektor pariwisata berkembang dinamis dan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga diperlukan sebuah perencanaan yang komprehensif dan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 sudah tidak relevan lagi dengan isu strategis saat ini dan masa berlakunya telah berakhir;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026-2045;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa

Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAN DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026-2045

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2026 sampai dengan tahun 2045.
2. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
5. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Daerah.
- (2) Tujuan dari Penyusunan Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. menetapkan arah kebijakan pembangunan destinasi wisata, industri wisata, pemasaran, kelembagaan pariwisata, dan sumber daya manusia pariwisata;
 - b. menjadi pedoman perencanaan pembangunan pariwisata di Daerah, dan
 - c. menjadi pedoman penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. dokumen RIPPARDA;
- b. jangka waktu;
- c. pelaksanaan;
- d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. kerjasama;
- f. pengawasan dan pengendalian;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pendanaan.

BAB II

DOKUMEN RIPPARDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dokumen RIPPARDA memuat:
 - a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kepariwisata;
 - b. Arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata;
 - c. Arah kebijakan dan strategi pembangunan industri pariwisata;
 - d. Arah kebijakan dan strategi pembangunan pemasaran pariwisata;
 - e. Arah kebijakan dan strategi pembangunan kelembagaan pariwisata;

- f. Arah kebijakan dan strategi pembangunan sumberdaya manusia pariwisata; dan
 - g. Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah.
- (2) Rincian Sasaran Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Visi dan Misi

Pasal 5

Visi pembangunan kepariwisataan yakni pariwisata yang berkualitas, berdaya saing tingkat internasional, inklusif, dan berkelanjutan untuk mewujudkan daerah istimewa yogyakarta yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan dijiwai kebudayaan dan keistimewaan.

Pasal 6

Misi Pembangunan Kepariwisata meliputi:

- a. membangun destinasi wisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- b. membangun industri pariwisata yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan memenuhi prinsip berkelanjutan;
- c. membangun pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab, inovatif, dan efektif;
- d. membangun kelembagaan pariwisata yang kredibel dan mendukung pengembangan ekosistem pariwisata yang kolaboratif dan sinergis;
- e. mengembangkan sumber daya manusia pariwisata yang kompeten, adaptif, fasih teknologi, dan berwawasan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Tujuan Pembangunan Kepariwisata

Pasal 7

Tujuan pembangunan kepariwisataan untuk:

- a. meningkatkan kualitas destinasi pariwisata yang didasarkan pada prinsip pariwisata berkelanjutan, inklusif, dan berbasis teknologi.
- b. mengkomunikasikan keunggulan dan keunikan pariwisata daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang menggerakkan perekonomian daerah, memberi lapangan pekerjaan untuk difabilitas dan

memberdayakan UMKM;

- d. mengembangkan kelembagaan pariwisata dan tata kelola kepariwisataan yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan SDM pariwisata dalam ekosistem pariwisata yang kuat; dan
- e. mengembangkan SDM pariwisata yang mampu menjadi penggerak utama kepariwisataan yang berkualitas, berdaya saing, berkelanjutan, inklusif, dan mendayagunakan teknologi.

Bagian Keempat

Arah kebijakan

Pasal 8

- (1) Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan terdiri atas:
 - a. arah kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata;
 - b. arah kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata;
 - c. arah kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
 - d. arah kebijakan Pembangunan Kelembagaan Pariwisata; dan
 - e. arah kebijakan Pembangunan Sumberdaya Manusia Pariwisata.
- (2) Arah kebijakan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Strategi

Pasal 9

- (1) Strategi pembangunan Kepariwisata Daerah terdiri atas:
 - a. strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata;
 - b. strategi Pembangunan Industri Pariwisata;
 - c. strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
 - d. strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata; dan
 - e. strategi Pembangunan Sumberdaya Manusia.
- (2) Strategi pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Indikasi Program
Pasal 10

- (1) Pencapaian program pembangunan Kepariwisata Daerah diukur dengan indikasi program.
- (2) Indikasi program pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi Program Pembangunan Destinasi Pariwisata;
 - b. indikasi Program Pembangunan Industri Pariwisata;
 - c. indikasi Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
 - d. indikasi Program Pembangunan Kelembagaan Pariwisata; dan
 - e. indikasi Program Pembangunan Sumberdaya Manusia.
- (3) Rincian Indikasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketujuh
Pembangunan Perwilayahan Pariwisata
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam pembangunan perwilayahan pariwisata Daerah menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:
 - a. sumber daya pariwisata alam, budaya, sejarah, dan adat istiadat yang potensial menjadi Daya Tarik Wisata;
 - b. potensi kunjungan pengunjung;
 - c. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa geopark;
 - d. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - e. ketersediaan infrastruktur dan sumber pendanaan;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - g. kekhususan atau keunikan dari wilayah; dan
 - h. mendukung penerapan ekonomi biru dan potensi wisata bahari.
- (3) Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Sumbu Filosofis;

- b. Kawasan Gunung Merapi;
 - c. Kawasan Prambanan-Shiva Plateau;
 - d. Kawasan Geopark Gunung Sewu;
 - e. Kawasan Pantai Selatan; dan
 - f. Kawasan Bukit Menoreh.
- (4) Daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Desa Wisata dan Kampung Wisata

Pasal 12

- (1) Pengembangan destinasi wisata dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan desa wisata dan kampung wisata.
- (2) Pembentukan desa wisata dan kampung wisata berdasarkan kriteria:
 - a. memiliki potensi Daya Tarik Wisata yang otentik dan menarik;
 - b. memiliki masyarakat lokal yang peduli dan memiliki keterikatan dengan Daya Tarik Wisata di daerahnya; dan
 - c. ketersediaan infrastruktur untuk kebutuhan Pengunjung yang sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Penetapan desa wisata dan kampung wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/ kota.

Bagian Kesembilan

Lembaga Pariwisata Daerah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan kepariwisataan membentuk Lembaga Pariwisata Daerah.
- (2) Tujuan pembentukan Lembaga Pariwisata Daerah adalah untuk mengkoordinasikan upaya pembangunan kepariwisataan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas kepentingan.
- (3) Lembaga Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - c. Asosiasi kepariwisataan;
 - d. Akademisi;
 - e. Media massa; dan

- f. Masyarakat/ komunitas.
- (4) Lembaga Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Bagian Kesepuluh

Kreasi Kegiatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan rencana kreasi kegiatan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin dan mengawasi keberlanjutan pelaksanaan kreasi kegiatan sebagai atraksi pariwisata.
- (3) Kreasi kegiatan dapat berbentuk:
 - a. selebrasi budaya;
 - b. pertunjukan seni;
 - c. pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran;
 - d. pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - e. kompetisi olahraga; dan/atau
 - f. kreasi kegiatan pariwisata lainnya yang memiliki daya tarik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif, pengawasan, dan bentuk kreasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 diatur dalam peraturan gubernur.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 15

- (1) Jangka waktu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali;
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. Perubahan kebijakan pariwisata nasional yang bersifat strategis; dan/atau
 - b. Perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan RIPPARDA mengacu kepada rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional.
- (2) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - c. rencana pembangunan jangka menengah daerah.

BAB V
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan kepariwisataan.
- (2) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. jaminan ketersediaan dan penyebarluasan data dan informasi Kepariwisata;
 - b. jaminan kemudahan akses data dan informasi Kepariwisata bagi masyarakat; dan
 - c. pengembangan sistem data dan informasi Kepariwisata terpadu sebagai satu data Pariwisata nasional.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau pihak lain untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata.
- (2) Pelaksanaan kerja sama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

RIPPARDA.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pariwisata, perencanaan pembangunan, dan sekretariat daerah bidang perekonomian.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARDA; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memberikan saran/masukan terhadap pelaksanaan RIPPARDA;
 - b. memberikan pendapat dalam peninjauan kembali RIPPARDA;
 - c. mengusulkan potensi wisata lokal yang bisa dikembangkan;
 - d. menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal terkait pengembangan pariwisata;
 - e. terlibat langsung dalam pengelolaan potensi kepariwisataan di wilayahnya melalui desa wisata dan/atau kampung wisata dan POKDARWIS;
 - f. menjadi pelaku usaha pariwisata;
 - g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program agar sesuai dengan Peraturan Daerah dan tidak merugikan masyarakat;
 - h. menyebarkan informasi mengenai pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan dalam pembangunan pariwisata;
 - i. mendorong edukasi wisata kepada wisatawan agar menghargai kearifan lokal;
 - j. menjadi duta pariwisata daerah yang memperkenalkan potensi lokal secara positif; dan/atau
 - k. berpartisipasi dalam menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan sekitar destinasi wisata.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan penyelenggaraan pembangunan pariwisata di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1, Tahun 2019) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

.....

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN.....
NOMOR.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2026-2045

I. UMUM

Pembangunan kepariwisataan yang efektif akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB). Selain itu, sektor pariwisata juga merupakan sektor yang padat karya, sehingga menyerap banyak tenaga kerja. Selain manfaat ekonomi, jika dikelola dengan baik dan bertanggung jawab, kehadiran sektor pariwisata dapat menjamin kelestarian alam dan budaya. Untuk dapat memberikan dampak optimal pada perekonomian dan tetap menjaga kualitas lingkungan dan nilai sosial budaya masyarakat, sektor pariwisata harus dibangun secara sistematis. Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan daerah perlu diatur dalam sebuah dokumen perencanaan yang diarahkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat serta tetap menjaga kualitas lingkungan dan sosial budaya.

Dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan DIY dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA). Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 yang kemudian diubah sebagian dengan PERDA No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda DIY Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi DIY Tahun 2012 – 2025, berakhir masa berlakunya pada tahun 2025.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dibentuk peraturan daerah untuk melanjutkan RIPPARDA ini sebagai acuan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan untuk menentukan langkah-langkah pembangunan strategis bagi sektor kepariwisataan di Daerah Istimewa Yogyakarta. RIPPARDA ini disusun dengan pendekatan perencanaan yang sistemik dengan melibatkan pemangku kepentingan kepariwisataan. Sebagai perencanaan sektor pariwisata, RIPPARDA ini disusun dengan mengacu dan harmonis dengan dokumen perencanaan strategis lainnya yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendekatan sistemik ini meliputi elemen-elemen ekosistem yang meliputi destinasi, industri, pemasaran, kelembagaan, dan sumber daya manusia. Ekosistem pariwisata dibentuk untuk memastikan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas kepentingan untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan menjadi pelaku usaha pariwisata misalnya seperti homestay, kuliner, kerajinan tangan, dan jasa pemandu wisata.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2026-2045

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026-2045

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sektor pariwisata yang berhasil bukan saja dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Jika dapat dikelola secara baik dan bertanggung jawab, kehadiran sektor pariwisata dapat menjamin kelestarian alam dan budaya, serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu, pembangunan kepariwisataan daerah perlu diatur dalam sebuah regulasi yang diarahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan (*environment*), sosial budaya (*community*), serta ekonomi (*economy*).

Sama halnya dengan RIPPARNAS yang digunakan sebagai panduan pembangunan kepariwisataan nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPARDA digunakan sebagai pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di daerah, sehingga dalam penyusunannya dibutuhkan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para stakeholder, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Jika merujuk pada Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 10 Tahun 2016, adapun yang dimaksud Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan provinsi/daerah untuk periode 15-25 tahun.

Dokumen RIPPARDA harus memuat beberapa bahasan, di antaranya

adalah potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan, isu-isu strategis yang harus dijawab, posisi pembangunan kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, rencana, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan. Untuk itu, penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata di daerah tidak bisa dikesampingkan.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 yang kemudian diubah sebagian dengan PERDA No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda DIY No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi DIY Tahun 2012 – 2025, di tahun 2025 akan berakhir masa pakainya. Dengan demikian, perlu dibuat peraturan daerah baru untuk melanjutkan RIPPARDA ini sebagai acuan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan untuk menentukan langkah-langkah pembangunan strategis bagi sektor kepariwisataan di daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Dokumen Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026-2045 dimaksudkan sebagai pedoman pengaturan dan pembangunan kepariwisataan daerah dengan tujuan sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pemahaman Seluruh Stakeholders Terkait dan Masyarakat

RIPPARDA DIY bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar pembangunan pariwisata berjalan selaras dengan kebijakan nasional dan daerah, mendorong partisipasi aktif, memperkuat peran pemerintah, mempermudah investasi, serta mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.

2. Meningkatkan Koordinasi Antar Sektor

Mengintegrasikan pembangunan pariwisata dengan sektor lain, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, untuk menciptakan sinergi pembangunan yang lebih baik.

3. Meningkatkan Komitmen Pemangku Kepentingan Mulai Dari Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi

RIPPARDA DIY bertujuan meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi pembangunan pariwisata melalui koordinasi yang kuat, keterlibatan aktif, serta tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan terarah.

4. Sebagai Panduan bagi Kabupaten/Kota Dalam Menyusun RIPPARDA

RIPPARDA DIY berfungsi sebagai panduan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RIPPARDA yang selaras dengan kebijakan daerah dan nasional, memastikan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan pariwisata yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

C. Pengertian

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2026 sampai dengan tahun 2045.
2. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
5. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan dokumen Perda DIY tentang RIPPARDA DIY Tahun 2026-2045 disusun dalam 4 (empat) bab dengan tata urutan sebagai berikut.

- | | | |
|---------|---|---|
| BAB I | : | Pendahuluan |
| BAB II | : | Paradigma Strategis Pembangunan Kepariwisata
DIY |
| BAB III | : | Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran |
| BAB IV | : | Arah Kebijakan, Strategi, dan Program |

BAB II

PARADIGMA STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DIY

A. Paradigma Pembangunan Kepariwisata DIY

Kerangka berpikir yang menjadi dasar dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sektor pariwisata di DIY akan mencakup berbagai aspek, mulai dari keberlanjutan, inklusivitas, keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, hingga penguatan budaya dan kearifan lokal. Berikut ini paradigma strategis pembangunan kepariwisataan DIY:



Gambar 2.1. Paradigma Strategis Pembangunan Kepariwisata DIY

1) Resiliensi Destinasi

Resiliensi destinasi pariwisata merujuk pada kemampuan suatu destinasi untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih dari berbagai gangguan atau krisis, seperti bencana alam, pandemi, atau perubahan iklim, tanpa kehilangan daya tarik dan fungsi utamanya sebagai tujuan wisata. Destinasi yang resilien biasanya memiliki sistem manajemen yang tangguh, keterlibatan komunitas lokal yang kuat, diversifikasi produk wisata, serta strategi pemulihan yang terencana. Dengan meningkatkan resiliensi, destinasi pariwisata dapat menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sekaligus memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi wisatawan.

2) Akselerasi Pariwisata Berkelanjutan

Dalam upaya percepatan dalam mengembangkan sektor pariwisata diharapkan tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat lokal. Hal ini melibatkan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pengelolaan destinasi, seperti penggunaan sumber daya secara efisien, pelestarian budaya, serta pemberdayaan komunitas. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, akselerasi ini bertujuan menciptakan pariwisata yang tangguh, inklusif, dan ramah lingkungan demi mendukung keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan pelestarian jangka panjang.

3) Transformasi Teknologi

Dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini, penting bagi sektor pariwisata bertransformasi melalui pemanfaatan teknologi digital dan inovasi. Teknologi seperti *Artificial Intelligence (AI)*, *big data*, *Internet of Things (IoT)*, serta realitas virtual dan augmentasi

telah merevolusi pengalaman wisatawan, mulai dari perencanaan perjalanan, pemesanan layanan, hingga interaksi di destinasi. Platform digital memungkinkan personalisasi layanan, efisiensi operasional, dan peningkatan pemasaran destinasi secara global. Selain itu, teknologi juga berperan penting dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dengan menyediakan data untuk pengambilan keputusan yang lebih bijak dan ramah lingkungan.

4) Sumber Daya Manusia Kompeten dan Adaptif

SDM pariwisata yang kompeten dan adaptif merupakan kunci utama dalam mendukung kemajuan dan daya saing industri pariwisata, terutama di tengah dinamika dan tantangan global yang terus berubah. Kompetensi mencakup penguasaan keterampilan teknis, komunikasi, pelayanan prima, hingga pemahaman terhadap budaya dan keberlanjutan, sementara sikap adaptif ditunjukkan melalui kemampuan untuk cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, kebutuhan wisatawan, serta situasi krisis. Dengan pelatihan yang berkelanjutan, kolaborasi antar-*stakeholder*, dan pemanfaatan teknologi, SDM pariwisata dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan pengalaman wisata yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di tingkat internasional.

5) Pariwisata Inklusif: Akses pada Difabel dan Masyarakat Miskin

Melalui pendekatan pariwisata inklusif memastikan setiap individu, termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat miskin, memiliki kesempatan yang setara untuk menikmati manfaat dari sektor pariwisata, baik sebagai wisatawan maupun sebagai pelaku industri. Ini mencakup penyediaan infrastruktur dan layanan yang aksesibel, seperti fasilitas ramah difabel, informasi dalam berbagai format, serta program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Dengan menciptakan lingkungan yang ramah, adil, dan partisipatif, pariwisata inklusif tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan, tetapi juga memperkuat keberlanjutan sosial dan menciptakan destinasi yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

6) Pendekatan Ekosistem

Pendekatan ekosistem pariwisata merupakan strategi pengembangan pariwisata yang holistik dan terintegrasi, dengan melihat seluruh elemen yang terlibat—seperti wisatawan, pelaku usaha, pemerintah, komunitas lokal, lingkungan, dan teknologi—sebagai bagian dari satu sistem yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, keterpaduan kebijakan, dan sinergi antar-*stakeholder* untuk menciptakan nilai bersama, menjaga keberlanjutan, serta memperkuat daya saing destinasi. Dengan menerapkan pendekatan ekosistem, pengembangan pariwisata tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada keseimbangan sosial, budaya, dan lingkungan dalam jangka panjang.

7) Manajemen Destinasi

Manajemen destinasi pariwisata adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan berbagai elemen dalam suatu destinasi guna menciptakan pengalaman wisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ini mencakup pengembangan atraksi, aksesibilitas, amenitas, promosi, serta pelibatan masyarakat lokal dan pelaku industri pariwisata. Tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan wisatawan, kepentingan masyarakat setempat, dan pelestarian lingkungan. Dengan manajemen yang efektif dan kolaboratif, destinasi dapat tumbuh secara berkelanjutan, mampu menghadapi tantangan global, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang merata.

8) Pariwisata Yang Berkualitas

Paradigma pariwisata yang berkualitas adalah kepariwisataan yang memberikan dampak paling optimal pada perekonomian lokal dan menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan. Pergeseran ke paradigma pariwisata berkualitas pada indikator kinerja kepariwisataan:

- Jumlah kunjungan (tetapi bukan indikator utama/ terutama)
- Peningkatan *spending* per wisatawan
- Peningkatan lama tinggal wisatawan
- Produk dan layanan yang berkualitas (SDM, produk, layanan, homestay, dll)
- Tingkat kepuasan warga dan wisatawan
- Dampak pada perekonomian lokal (penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat)
- Indeks Pembangunan kebudayaan
- Indeks Lingkungan Hidup



Gambar 2.2. Indikator Pembangunan Pariwisata Berkualitas

B. Prinsip Pembangunan Kepariwisataan

Penyelenggaraan kepariwisataan DIY akan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjunjung tinggi norma agama, hak asasi manusia, adat istiadat, nilai budaya, dan nilai sejarah;
- c. menghargai keragaman budaya dan kearifan lokal;
- d. mengutamakan Warisan Budaya dan kearifan local sebagai daya tarik wisata budaya;
- e. mengembangkan sikap berkepribadian dalam berkebudayaan;
- f. menumbuhkan budaya berwisata;
- g. menjamin Pengunjung mendapatkan kemudahan beribadah;
- h. menerapkan Pariwisata berkelanjutan;
- i. menerapkan manajemen mitigasi bencana;
- j. menghormati hak Penyandang Disabilitas, ibu hamil, lansia, dan kaum rentan;
- k. menjamin Pengunjung memperoleh nilai manfaat dari Daya Tarik Wisata yang dikunjungi;
- l. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- m. memberdayakan masyarakat setempat;
- n. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- o. melibatkan seluruh pihak pemangku kepentingan terkait pariwisata;
- p. menjamin aksesibilitas berwisata bagi semua pihak; dan
- q. mematuhi kode etik Kepariwisata global dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata.

C. Konsep Pembangunan Kepariwisata

Pembangunan kepariwisataan DIY diharapkan akan berperan sebagai pendorong transformasi ekonomi. Hal ini sesuai dengan Misi RPJPN 2025-2045 dengan Misi RPJPD DIY 2025-2045 diwujudkan dengan menurunkan 8 (delapan) misi Pembangunan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 ke dalam 8 (delapan) misi pembangunan RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045 dengan memuat setidaknya kata kunci sebagai berikut:

- (1) Transformasi Sosial
- (2) Transformasi Ekonomi
- (3) Transformasi Tata Kelola
- (4) Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
- (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- (6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

- (7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- (8) Kestinambungan Pembangunan

Sektor pariwisata terkait pada misi pembangunan Transformasi Ekonomi DIY, yang mencakup 8 (delapan) Strategi Transformasi Ekonomi, yaitu:

- (1) Modernisasi Pertanian (termasuk didalamnya perikanan, kelautan dan peternakan) melalui pemanfaatan teknologi dan penerapan prinsip-prinsip agroindustri dan agribisnis yang terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penguatan Akses terhadap Faktor Produksi Pertanian, seperti permodalan, sumberdaya lahan, sumber daya manusia serta penguatan kelembagaan, koperasi pertanian dan kolaborasi dengan pasar didukung perlindungan terhadap usaha tani melalui asuransi pertanian.
- (3) Percepatan Penyediaan Infrastruktur Penunjang Aktivitas Industri yang Andal (Ketenagalistrikan; Penyediaan Air Baku dan Sistem Transmisi/Distribusinya; Akses Telekomunikasi dan Digital; Pengelolaan Limbah dan Sampah Industri; Fasilitas Kesehatan bagi Pekerja).
- (4) Pengembangan Berbagai Jenis Kepariwisata yang Berkelanjutan, Berkualitas, Berbasis Kearifan Lokal dan Inklusif dengan pemenuhan Layanan yang Paripurna dalam aspek 6A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas. *Ancillary Services*/Layanan Pendukung, Aktivitas dan *Available Packages*/Ketersediaan Paket Wisata.
- (5) Transformasi Industri Pengelolaan, Industri Kreatif dan UMKM menuju Peningkatan peran pada rantai nilai industri domestik dan global melalui peningkatan akses ke pasar internasional baik secara fisik maupun digital, kemitraan dengan industri logistik dan peningkatan akses ke faktor produksi penting.
- (6) Transformasi Industri di DIY menuju digitalisasi industri serta perluasan industri digital untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah.
- (7) Pengembangan Pusat Pertumbuhan di DIY antara lain melalui Pengembangan Satuan Ruang Strategis Keistimewaan DIY, Pengembangan Kawasan Aerotropolis di Kulonprogo dan Pengembangan Pantai Selatan (Pansela).
- (8) Peningkatan akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Konektivitas, khususnya di Kawasan Selatan.

Peran sektor pariwisata DIY sebagai pendorong transformasi ekonomi yang diharapkan untuk merespon isu strategis pembangunan DIY adalah:



Gambar 2.3. Peran Sektor Pariwisata dalam Transformasi Ekonomi

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Perumusan isu strategis dan paradigma strategis pembanguana kepariwisataan menjadi dasar dalam perumusan Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan. Visi pembangunan kepariwisataan ini merupakan upaya dan dalam kerangka pencapaian Visi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi yang meliputi elemen-elemen ekosistem kepariwataan. Tujuan ditetapkan untuk memberikan pencapaian yang ingin diwujudkan dalam pembangunan kepariwisataan. Agar tujuan tersebut bisa diukur, maka sasaran ditetapkan. Sasaran memuat indikator kinerja yang terukur, dalam 2 (dua) skenario pembangunan kepariwisataan, yaitu skenario moderat dan optimis. Skenario moderat didasarkan pada asumsi bahwa adalah saat pemeliharaan program dilaksanakan dengan konsisten dan pengembangan infrastruktur/ faktor pendukung kepariwisataan dilaksanakan seperti biasa (*business as usual*). Skenario optimis terjadi jika program pembangunan pariwisata dilaksanakan secara intensif dan inovatif dan pengembangan infrastruktur, faktor pendukung kepariwisataan, dan aksesibilitas udara dilaksanakan secara akseleratif

A. Visi

Visi Pembangunan Kepariwisataa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kondisi yang diharapkan akan dicapai pada akhir periode perencanaan, yaitu tahun 2045. Visi Pembangunan Kepariwisataa DIY Tahun 2026-2045 dirumuskan sebagai berikut:

“Pariwisata yang Berkualitas, Berdaya Saing Tingkat Internasional, Inklusif, dan Berkelanjutan untuk mewujudkan DIY yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan Dijiwai Kebudayaan dan Keistimewaan.”

B. Misi

Misi Pembangunan Kepariwisataa DIY Tahun 2026-2045, yaitu:

1. Membangun destinasi wisata berbasis budaya yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan;
2. Membangun industri pariwisata yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan memenuhi prinsip berkelanjutan;
3. Membangun pemasaran pariwisata berbasis budaya yang bertanggungjawab, inovatif, dan efektif;
4. Membangun kelembagaan pariwisata yang kredibel dan mendukung pengembangan ekosistem pariwisata yang kolaboratif dan sinergis;

5. Mengembangkan sumber daya manusia pariwisata yang kompeten, adaptif, fasih teknologi, dan berwawasan berkelanjutan.

C. Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Tujuan pembangunan kepariwisataan DIY yang diharapkan akan mencapai:

1. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata yang didasarkan pada prinsip pariwisata berkelanjutan, inklusif, dan berbasis teknologi.
2. Mengkomunikasikan keunggulan dan keunikan pariwisata daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
3. Mewujudkan industri pariwisata yang menggerakkan perekonomian daerah, memberi lapangan pekerjaan untuk difabilitas dan memberdayakan UMKM;
4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan SDM pariwisata dalam ekosistem pariwisata yang kuat; dan
5. Mengembangkan SDM pariwisata yang mampu menjadi penggerak utama kepariwisataan yang berkualitas, berdaya saing, berkelanjutan, inklusif, dan mendayagunakan teknologi.

D. Tahapan Pembangunan Kepariwisataan Daerah

Tahapan pembangunan kepariwisataan DIY tahun 2026-2045 akan dilaksanakan dalam empat tahap sebagai berikut:

Tahap I (2026-2029) Fondasi Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Tahap II (2030-2034) Akselerasi Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Tahap III (2035-2039) Ekspansi Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	Tahap IV (2040-2045) Perwujudan Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan
Optimalisasi potensi pariwisata dalam kerangka pembangunan pariwisata berkualitas	Peningkatan produktivitas dan optimalisasi pariwisata berkualitas	Penguatan daya saing internasional dari pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	Kepariwisataan DIY yang berdaya saing internasional, berkualitas, dan berkelanjutan untuk mewujudkan VISI DIY

E. Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah

Sasaran pembangunan kepariwisataan DIY tahun 2026-2045 yaitu:

Indikator Kinerja Utama	Baseline (2024)	2030		2035		2040		2045	
		Moderat*)	Optimis**)	Moderat*)	Optimis**)	Moderat*)	Optimis**)	Moderat*)	Optimis**)
Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB (%) ¹⁾	10,18%	10,5%	10,7%	11,5%	12,5%	12,8%	13,5%	13,7%	15,3%
Serapan TK oleh sektor pariwisata (orang) ²⁾	72.622	94.580	122.731	124.520	161.701	163.564	196.369	201.010	245.400
Jumlah wisatawan nusantara (orang) ³⁾	7.591.275	8.350.403	9.018.435	9.649.725	10.325.206	10.944.718	11.601.401	12.181.471	12.790.545
Jumlah wisatawan nusantara (perjalanan) ⁴⁾	32 juta	36.800.000	40.000.000	41.400.000	48.000.000	44.712.000	56.160.000	48.736.080	64.584.000
Jumlah wisatawan mancanegara (orang) ⁵⁾	236.463	295.578	331.048	399.031	453.536	558.643	657.627	726.236	887.796
Rata-rata Lama Tinggal wisatawan nusantara (hari) ⁶⁾	1,35	1,49	1,63	1,83	2,10	2,46	2,90	3,20	3,71

Indikator Kinerja Utama	Baseline (2024)	2030		2035		2040		2045	
		Moderat*)	Optimis**)	Moderat*)	Optimis**)	Moderat*)	Optimis**)	Moderat*)	Optimis**)
Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari) ⁷⁾	2,18	2,40	2,64	2,90	3,311	3,77	4,22	4,77	5,58
Rata-rata Pembelanjaan wisatawan nusantara per perjalanan ke DIY ⁸⁾	2.128.142	2.340.956	2.598.461	5.898.507	6.635.821	7.498.477	8.450.784	9.718.402	11.205.317
Rata-rata Pembelanjaan wisatawan mancanegara per kunjungan (US\$) ⁹⁾	642	706	777	855	940	1.034	1.137	1.251	1.376
Investasi pariwisata (Milyar Rp) ¹⁰⁾	675	775	1.058	1.067	1.250	1.253	1.369	1.455	1.728

Keterangan:

- 1) Kontribusi sektor pariwisata diukur dari lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum
- 2) Serapan TK oleh sektor pariwisata diukur dari jumlah TK di lapangan usaha penyediaan akomodasi
- 3) Jumlah wisatawan nusantara dihitung dari jumlah wisatawan yang menginap di akomodasi komersial
- 4) Jumlah wisatawan nusantara dihitung berdasarkan jumlah perjalanan menurut *Mobile Positioning Data*
- 5) Jumlah wisatawan mancanegara dihitung dari jumlah wisatawan yang menginap di akomodasi komersial

- 6) Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara dihitung dari lama menginap di akomodasi komersial (Rata-rata Lama Menginap Tamu)
- 7) Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dihitung dari lama menginap di akomodasi komersial (Rata-rata Lama Menginap Tamu)
- 8) Rata-rata pembelanjaan wisatawan nusantara dihitung dari total pembelanjaan saat berwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta
- 9) Rata-rata pembelanjaan wisatawan mancanegara dihitung dari total pembelanjaan saat berwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta
- 10) Investasi Pariwisata adalah investasi pada usaha yang masuk ke KBLI pariwisata

Catatan:

*) Skenario Moderat: pemeliharaan program dilaksanakan dengan konsisten dan pengembangan infrastruktur/ faktor pendukung kepariwisataan dilaksanakan seperti biasa (*business as usual*).

**) Skenario Optimis: program pembangunan pariwisata dilaksanakan secara intensif dan inovatif dan pengembangan infrastruktur, faktor pendukung kepariwisataan, dan aksesibilitas udara dilaksanakan secara akseleratif.

BAB IV
 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
 TAHUN 2026-2045

A. Arah Kebijakan, Strategi, dan Indikasi Program Pembangunan Destinasi Pariwisata

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi	Tahap 2 Akselerasi	Tahap 3 Perluasan	Tahap 4 Perwujudan Visi	Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait											
I.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan destinasi cerdas (<i>smart destination</i>) berbasis teknologi																	
1)	STRATEGI: mengembangkan interpretasi destinasi wisata berbasis teknologi untuk meningkatkan apresiasi wisatawan																	
a.	Pengembangan interpretasi destinasi berbasis teknologi untuk meningkatkan apresiasi wisatawan pada destinasi berbasis warisan budaya dan alam (museum, warisan budaya benda dan tak benda, dan geosites yang merupakan <i>Geopark</i> Jogja dan <i>Geopark</i> Gunung Sewu)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Kominfo Kebudayaan
b.	Pengembangan sistem informasi destinasi yang berisi semua unsur destinasi (atraksi, akses, amenitas, layanan pendukung, dan mitigasi bencana)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Kominfo BPBD
c.	Pengembangan akses informasi untuk wisatawan kepada informasi destinasi sesuai kebutuhan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Kominfo
2)	STRATEGI: mengembangkan infrastruktur komunikasi di destinasi wisata																	
a.	Pengembangan jaringan komunikasi internet di destinasi wisata	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kominfo	Pariwisata
3)	STRATEGI: mengembangkan bisnis <i>start-up</i> dan wirausaha berbasis teknologi dan institusi pendidikan untuk mengembangkan pariwisata berbasis teknologi																	
a)	Pengembangan dukungan pengembangan bisnis <i>start-up</i> teknologi yang mengembangkan pariwisata berbasis teknologi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kominfo	Penanaman modal

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi					Tahap 2 Akselerasi					Tahap 3 Perluasan					Tahap 4 Perwujudan Visi					Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
																							Pendidikan Pariwisata
b)	Pengembangan kemitraan strategis dengan institusi pendidikan untuk mengembangkan model dan kapasitas destinasi pariwisata berbasis teknologi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pendidikan	Penanaman modal Pariwisata
II.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) oleh provinsi secara sinergis dengan kabupaten/ kota untuk mewujudkan pariwisata berkualitas dan mendukung ekonomi biru (<i>blue economy</i>) dan Kawasan Wisata lain yang mendukung dan komplementer dengan KSPP																						
1)	STRATEGI: mengembangkan standar dan kriteria destinasi yang berstandar internasional																						
a.	Pengembangan standar dan kriteria untuk destinasi, daya tarik wisata, infrastruktur dasar-transportasi-telekomunikasi-sosial, angkutan wisata, akomodasi, dan amenities wisata yang bertaraf/berstandar internasional	√			√				√			√			√							Pariwisata	PU Tata Ruang Perhubungan LH
2)	STRATEGI: mengembangkan kawasan pariwisata selain KSPP sebagai pendukung yang sinergis dan komplementer dengan KSPP																						
a.	Pengembangan prasarana dan sarana dan amenities wisata	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PU	Pariwisata
b.	Pengembangan layanan transportasi yang terkoneksi dengan KSPP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Perhubungan	Pariwisata
c.	Pengembangan atraksi wisata yang sinergis dan komplementer dengan atraksi wisata di KSPP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Kebudayaan
3)	STRATEGI: mengembangkan <i>masterplan</i> pengembangan holistik Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi																						
a.	Pengembangan <i>masterplan</i> KSPP Kawasan Sumbu Filosofis yang meliputi tema kawasan, zonasi dan peruntukannya, mitigasi bencana, dan <i>carrying capacity</i> (daya tampung dan daya dukung)	√					√					√				√						Pariwisata	PU Tata Ruang Perhubungan

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi					Tahap 2 Akselerasi					Tahap 3 Perluasan					Tahap 4 Perwujudan Visi					Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
																							LH BPBD
b.	Pengembangan <i>masterplan</i> KSPP Kawasan Gunung Merapi yang meliputi tema kawasan, zonasi dan peruntukannya, mitigasi bencana, dan <i>carrying capacity</i> (daya tampung dan daya dukung)	√					√					√					√					Pariwisata	PU Tata Ruang Perhubungan LH BPBD
c.	Pengembangan <i>masterplan</i> KSPP Kawasan Pantai Selatan yang meliputi tema kawasan, zonasi dan peruntukannya, mitigasi bencana dan <i>carrying capacity</i> (daya tampung dan daya dukung)	√					√					√					√					Pariwisata	PU Tata Ruang Perhubungan LH BPBD Kelautan
d.	Pengembangan <i>masterplan</i> KSPP Kawasan Prambanan-Shiva Plateau yang meliputi tema kawasan, zonasi dan peruntukannya, mitigasi bencana, dan <i>carrying capacity</i> (daya tampung dan daya dukung)		√					√					√					√				Pariwisata	PU Tata Ruang Perhubungan LH BPBD
e.	Pengembangan <i>masterplan</i> KSPP Kawasan Geopark Gunung Sewu yang meliputi tema kawasan, zonasi dan peruntukannya, mitigasi bencana, dan <i>carrying capacity</i> (daya tampung dan daya dukung)		√					√					√					√				Pariwisata	PU Tata Ruang Perhubungan LH BPBD

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi	Tahap 2 Akselerasi	Tahap 3 Perluasan	Tahap 4 Perwujudan Visi	Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
f.	Pengembangan <i>masterplan</i> KSPP Kawasan Bukit Menoreh yang meliputi tema kawasan, zonasi dan peruntukannya, mitigasi bencana, dan <i>carrying capacity</i> (daya tampung dan daya dukung)	√	√	√	√	Pariwisata	PU Tata Ruang Perhubungan LH BPBD
III.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang berstandar internasional di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP)						
1)	STRATEGI: mengembangkan DTW Provinsi sebagai DTW unggulan berstandar internasional						
a.	Mengembangkan DTW Provinsi berstandar internasional di KSPP Kawasan Sumbu Filosofis	√	√	√	√	PU	Pariwisata Industri
b.	Mengembangkan DTW Provinsi berstandar internasional di Kawasan Gunung Merapi	√	√	√	√	PU	Pariwisata Industri
c.	Mengembangkan DTW Provinsi berstandar internasional di KSPP Kawasan Pantai Selatan	√	√	√	√		Pariwisata Industri
d.	Mengembangkan DTW Provinsi berstandar internasional di KSPP Kawasan Prambanan-Shiva Plateau	√	√	√	√		Pariwisata Industri
e.	Mengembangkan DTW Provinsi berstandar internasional di KSPP Kawasan Geopark Gunung Sewu	√	√	√	√		Pariwisata Industri
f.	Mengembangkan DTW Provinsi berstandar internasional di KSPP Kawasan Bukit Menoreh	√	√	√	√	PU	Pariwisata Industri
IV.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan sarana prasarana yang berstandar internasional di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)						

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi					Tahap 2 Akselerasi					Tahap 3 Perluasan					Tahap 4 Perwujudan Visi					Pemangku kepentingan utama		Pemangku kepentingan terkait	
1)	STRATEGI: mengembangkan sarana dan prasarana umum berstandar internasional di KSPP dan KEK Pariwisata																								
a.	Pengembangan infrastruktur dasar (air dan energi)	√					√					√					√					PU	Pariwisata		
b.	Pengembangan infrastruktur transportasi	√					√					√					√					PU	Perhubungan Pariwisata		
c.	Pengembangan infrastruktur komunikasi (internet, pembayaran digital, dll)	√					√					√					√					Kominfo	Industri Keuangan Pariwisata		
d.	Pengembangan infrastruktur sosial (Rumah Sakit, sekolah, rumah ibadah, dll)	√					√					√					√					PU	Sosial Kesehatan Pendidikan		
2)	STRATEGI: mengembangkan amenities wisata berstandar internasional di KSPP dan KEK Pariwisata																								
a.	Pengembangan akomodasi	√		√					√					√				√							
b.	Pengembangan amenities wisata (parkir, toilet, dll)	√		√					√					√				√							
V.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata																								
1)	STRATEGI: mengembangkan KEK Pariwisata secara sistematis dan terencana dengan baik (<i>well-planned</i>) dan terkoordinasi dengan baik (<i>well-coordinated</i>)																								
a.	Identifikasi dan penyiapan kawasan yang menjadi KEK Pariwisata	√					√					√					√					Setda	Tata Ruang PU LH Pariwisata Pemkab/ Pemkot		

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi					Tahap 2 Akselerasi					Tahap 3 Perluasan					Tahap 4 Perwujudan Visi					Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
b.	Pengembangan regulasi dan tata kelola KEK Pariwisata	√					√					√					√					Setda	Tata Ruang PU LH Pariwisata Pemkab/ Pemkot
c.	Pengembangan <i>masterplan</i> KEK Pariwisata	√					√					√					√					Setda	Tata Ruang PU LH Pariwisata Pemkab/ Pemkot
VI.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata																						
1)	STRATEGI: mengembangkan manajemen transportasi dan moda transportasi umum untuk konektivitas di dalam dan antar KSPP dan KEK																						
a.	Pengembangan moda transportasi umum di dalam KSPP dan KEK Pariwisata yang menghubungkan antar Daya Tarik Wisata	√					√					√					√					Perhubungan	Pariwisata
b.	Pengembangan moda transportasi umum yang menghubungkan KSPP dan KEK Pariwisata	√					√					√					√					Perhubungan	Pariwisata
c.	Pengembangan sirkulasi dan manajemen transportasi dan penataan parkir di KSPP dan KEK Pariwisata	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Perhubungan	Pariwisata
2)	STRATEGI: Pengembangan regulasi dan standarisasi untuk moda angkutan wisata yang diusahakan masyarakat di KSPP dan KEK																					Perhubungan	Pariwisata

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi	Tahap 2 Akselerasi	Tahap 3 Perluasan	Tahap 4 Perwujudan Visi	Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
	Pariwisata						
a.	Pengembangan regulasi dan standar	√	√	√	√	Perhubungan	Pariwisata
b.	Pembinaan moda angkutan wisata yang diusahakan masyarakat	√	√	√	√	Perhubungan	Pariwisata
VII.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan investasi pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata						
1)	STRATEGI: mengembangkan investasi untuk melibatkan sektor swasta dalam pengembangan KSPP						
a.	Pengembangan <i>Investment Project Ready-to-Offer</i> (IPRO) untuk investasi usaha pariwisata beresiko menengah di KSPP	√	√	√	√	PENANAMAN MODAL	Pariwisata
b.	Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk investasi pariwisata beresiko menengah di KSPP	√	√	√	√	PENANAMAN MODAL	Pariwisata
2)	STRATEGI: mengembangkan investasi untuk melibatkan sektor swasta dalam pengembangan KEK Pariwisata						
a.	Pengembangan IPRO untuk investasi usaha pariwisata beresiko menengah di KEK Pariwisata	√	√	√	√	PENANAMAN MODAL	Pariwisata
b.	Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk investasi pariwisata beresiko menengah di KEK Pariwisata	√	√	√	√	PENANAMAN MODAL	Pariwisata
VIII	ARAH KEBIJAKAN: Pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata						
1)	STRATEGI: mengembangkan desa wisata dan kampung wisata yang berdaya saing						
a.	Penyusunan <i>masterplan</i> pengembangan desa wisata yang berketahanan dan berdaya saing	√	√	√	√	Pariwisata	Industri Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi					Tahap 2 Akselerasi					Tahap 3 Perluasan					Tahap 4 Perwujudan Visi					Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
b.	Pengembangan desa wisata dan kampung wisata yang berketahanan dan berdaya saing di KSPP agar sinergis dan komplementer dengan daya tarik wisata lain di KSPP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Industri Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan		
c.	Pengembangan daya tarik wisata yang dikelola masyarakat dengan standar internasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Industri Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan		
2)	STRATEGI: mengembangkan potensi desa/ kampung menjadi daya tarik wisata untuk memberikan nilai tambah pada potensi tersebut																						
a.	Peningkatan nilai tambah potensi desa/ kampung menjadi daya tarik wisata melalui fasilitasi amenities pariwisata yang berstandar internasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	PU Kebudayaan Pemberdayaan Perempuan Koperasi dan UKM		
b.	Penguatan produk lokal dan produk ekonomi kreatif di destinasi wisata untuk disinergikan dengan kepariwisataan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Koperasi dan UKM Perdagangan Pertanian		

B. Arah Kebijakan, Strategi, dan Indikasi Program Pembangunan Industri Pariwisata

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi	Tahap 2 Akselerasi	Tahap 3 Perluasan	Tahap 4 Perwujudan Visi	Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
I.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan industri pariwisata yang mengarustamakan tanggungjawab pada lingkungan						
1)	STRATEGI: standardisasi dan sertifikasi industri pariwisata yang bertanggungjawab pada lingkungan (<i>green industry</i>)						
a.	Pengembangan standar tanggungjawab lingkungan untuk industri pariwisata (13 usaha pariwisata)	√	√	√	√	√	Pariwisata Lingkungan Hidup Industri
b.	Fasilitasi sertifikasi internasional untuk industri pariwisata hijau dengan standar internasional	√	√	√	√	√	Pariwisata Lingkungan Hidup Industri
2)	STRATEGI: mengembangkan sistem insentif dan disinsentif untuk mendukung pengarustamaan tanggungjawab pada lingkungan, pertumbuhan wirasusaha, dan peluang kerja bagi difabilitas						
a.	Pengembangan sistem <i>monitoring</i> dan evaluasi usaha pariwisata yang mengarusutamakan tanggungjawab tersebut	√	√	√	√	√	Pariwisata Lingkungan Hidup Industri
b.	Pemberian insentif pada usaha pariwisata yang mengarusutamakan tanggungjawab tersebut	√	√	√	√	√	Pariwisata Lingkungan Hidup Industri
II.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan industri pariwisata yang kredibel dan berdaya saing						
1)	STRATEGI: mengembangkan kredibilitas usaha pariwisata						
a.	Penerapan kewajiban pendaftaran dan perizinan usaha pariwisata	√	√	√	√	√	PENANAMAN MODAL Pariwisata

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi					Tahap 2 Akselerasi					Tahap 3 Perluasan					Tahap 4 Perwujudan Visi					Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
b.	Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Naker Industri LSP
2)	STRATEGI: mengembangkan sistem insentif dan disinsentif bagi industri yang kredibel																						
a.	Pengembangan sistem <i>monitoring</i> dan evaluasi perizinan, standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	PENANAMAN MODAL Satpol PP
b.	Pemberian penghargaan dan insentif pada usaha pariwisata yang sudah memenuhi standar internasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	PENANAMAN MODAL
III.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan industri pariwisata yang mendukung pengembangan perekonomian lokal																						
1)	STRATEGI: mengembangkan <i>forward and backward linkages</i> dari industri pariwisata																						
a.	Pengembangan sistem kemitraan industri pariwisata dengan UMKM yang menghasilkan produk lokal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Koperasi & UKM Industri
b.	Pengembangan <i>business-matching</i> antara UMKM lokal dengan industri pariwisata untuk mendukung pengembangan wirausaha	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Koperasi & UKM Industri
2)	STRATEGI: mengembangkan sistem dan mekanisme dukungan untuk industri pariwisata yang menyerap produk lokal																						
a.	Pengembangan sistem <i>monitoring</i> dan evaluasi usaha pariwisata yang mendukung pengembangan perekonomian lokal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Koperasi & UKM Industri
b.	Pemberian penghargaan/ insentif pada usaha pariwisata yang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Koperasi &

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi					Tahap 2 Akselerasi					Tahap 3 Perluasan					Tahap 4 Perwujudan Visi					Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
	mendukung perekonomian lokal																						UKM Industri
IV.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan industri pariwisata yang mendayagunakan teknologi																						
1)	STRATEGI: mengembangkan regulasi dan mekanisme adopsi teknologi informasi oleh industri pariwisata																						
a.	Pengembangan basis data industri pariwisata yang berbasis teknologi informasi	√			√		√			√		√			√		√			√		Pariwisata	Kominfo Industri
b.	Pengembangan skema regulasi dan fasilitasi industri pariwisata yang berbasis teknologi (hotel, biro perjalanan, dll)		√			√		√					√			√		√				Pariwisata	Kominfo Industri
2)	STRATEGI: menguatkan adopsi teknologi oleh UMKM Pariwisata																						
a.	Pelatihan dan pendampingan untuk mendorong adopsi teknologi oleh UMKM Pariwisata	√			√		√			√			√			√			√			Pariwisata	Kominfo Koperasi & UKM
b.	Pengembangan sistem <i>monitoring</i> dan evaluasi atas implementasi regulasi usaha pariwisata berbasis teknologi	√		√			√		√			√		√		√		√				Pariwisata	Kominfo

C. Arah Kebijakan, Strategi, dan Indikasi Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi					Tahap 2 Akselerasi					Tahap 3 Perluasan					Tahap 4 Perwujudan Visi					Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
I.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab (<i>responsible tourism marketing</i>) untuk mendukung pengembangan citra destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan																						
1)	STRATEGI: Edukasi wisatawan untuk menghasilkan wisatawan yang bertanggungjawab																						
a.	Pengembangan materi pemasaran pariwisata dengan muatan edukasi <i>Does & Donts</i> pelestarian lingkungan dan apresiasi budaya lokal	√		√			√		√			√		√			√		√		√	Pariwisata	Kebudayaan Industri
b.	Pengembangan pemasaran pariwisata yang melindungi hak wisatawan	√		√			√		√			√		√			√		√		√	Pariwisata	Industri
2)	STRATEGI: Pengembangan pola perjalanan wisatawan yang mendukung apresiasi budaya dan minat khusus																						
a.	Pengembangan pola perjalanan wisata dengan tema budaya	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		Pariwisata	Kebudayaan Industri
b.	Pengembangan pola perjalanan wisata dengan tema desa wisata	√			√			√			√		√		√		√		√		√	Pariwisata	Industri Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
c.	Pengembangan pola perjalanan wisata dengan tema minat khusus (<i>MICE, sports, wellness, gastronomy, shopping & lifestyle, geowisata Geopark Jogja dan Geopark Gunungsewu, dll</i>).	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		Pariwisata	Industri
d.	Pengembangan pola perjalanan untuk mendukung DIY sebagai bagian dari rangkaian destinasi di luar DIY dan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Industri

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi					Tahap 2 Akselerasi					Tahap 3 Perluasan					Tahap 4 Perwujudan Visi					Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
	sebagai destinasi transit																						
II.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan pemasaran pariwisata yang inovatif tepat sasaran (<i>well-targeted</i>)																						
1)	STRATEGI: pengembangan promosi inovatif dan terintegrasi untuk menarik wisatawan mancanegara																						
a.	Pengembangan promosi <i>above-the-line</i> di pasar-pasar sasaran utama untuk menarik wisatawan mancanegara (iklan majalah, audiovisual, <i>Out-of-Home</i> (OOH), dll)		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√	Pariwisata	Industri
b.	Pengembangan promosi <i>below-the-line</i> di pasar-pasar sasaran utama untuk menarik wisatawan mancanegara (<i>travel mart</i> , <i>sales mission</i> , <i>tourism forum</i> , dll)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Industri
2)	STRATEGI: pengembangan promosi inovatif dan terintegrasi untuk menarik wisatawan nusantara																						
a.	Pengembangan promosi <i>above-the-line</i> di pasar-pasar sasaran utama untuk menarik wisatawan nusantara (iklan majalah, audiovisual, OOH, dll)	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		Pariwisata	Industri
b.	Pengembangan promosi <i>below-the-line</i> di pasar-pasar sasaran utama untuk menarik wisatawan nusantara (<i>travel mart</i> , <i>sales mission</i> , <i>table top</i> , <i>tourism forum</i> , dll)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Industri
3)	STRATEGI: mengembangkan promosi untuk menarik wisatawan minat khusus sesuai tema unggulan pariwisata DIY																						
a.	Pengembangan promosi wisata minat khusus/ tematik untuk MICE		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√	Pariwisata	Industri Komunitas
b.	Pengembangan promosi wisata minat khusus/ tematik <i>sport tourism</i>	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		Pariwisata	Industri Komunitas

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi					Tahap 2 Akselerasi					Tahap 3 Perluasan					Tahap 4 Perwujudan Visi					Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
c.	Pengembangan promosi wisata minat khusus/ tematik <i>wellness tourism</i>		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√	Pariwisata	Industri Komunitas
d.	Pengembangan promosi wisata minat khusus/ tematik <i>gastronomy, shopping & lifestyle</i>	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		Pariwisata	Industri Komunitas
e.	Pengembangan promosi wisata minat khusus/ tematik <i>homestays</i> dan desa wisata		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√	Pariwisata	Industri Komunitas
III.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan pemasaran pariwisata yang kolaboratif dan sinergis lintas wilayah-lintas sektor-lintas kepentingan																						
1)	STRATEGI: mengembangkan pemasaran terpadu dan sinergis dengan kabupaten/ kota																						
a.	Pengembangan pemasaran terpadu dan sinergis dengan kabupaten/ kota untuk menyasar segmen pasar wisatawan mancanegara yang sama	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Pemkab/ Pemkot
b.	Pengembangan pemasaran terpadu dan sinergis dengan kabupaten/ kota untuk menyasar segmen pasar wisatawan nusantara yang sama	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Pemkab/ Pemkot
2)	STRATEGI: mengembangkan kemitraan pemasaran terpadu lintas sektor dan lintas kepentingan																						
a.	Pengembangan pemasaran terpadu untuk <i>Tourism, Trade, & Investment</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Setda DIY	Pariwisata Penanaman Modal Perdagangan Koperasi&UKM
b.	Pengembangan pemasaran terpadu antara pemerintah dan swasta	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Industri

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi					Tahap 2 Akselerasi					Tahap 3 Perluasan					Tahap 4 Perwujudan Visi					Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
IV.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan pemasaran pariwisata berbasis budaya sebagai pembentuk keunikan produk dan citra pariwisata																						
1)	STRATEGI: mengembangkan pemasaran berbasis budaya untuk menguatkan citra pariwisata berbasis budaya																						
a.	Pengembangan pemasaran berbasis budaya untuk menguatkan citra pariwisata berbasis budaya melalui keikutsertaan di forum budaya dan forum pariwisata nasional maupun internasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Kebudayaan	
b.	Pengembangan <i>event</i> dan festival pariwisata dan ekonomi kreatif yang membentuk keunikan dan citra destinasi yang berkualitas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Kebudayaan	
c.	Pengembangan manajemen dan komunikasi pemasaran <i>event</i> dan festival parekras secara strategis	√		√		√		√				√					√				Pariwisata	Kebudayaan	
2)	STRATEGI: mengembangkan interpretasi daya tarik budaya secara populer																						
a.	Pengembangan materi interpretasi/narasi DTW sejarah, budaya, dan museum	√			√			√			√			√			√			√	Pariwisata	Kebudayaan Instu	
b.	Pengembangan pemasaran pariwisata yang didukung oleh film dan karya kreatif budaya lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Kebudayaan	
V.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan pemasaran pariwisata berbasis teknologi																						
1)	STRATEGI: pengembangan pemasaran digital secara terintegrasi																						
a.	Pengembangan pemasaran digital yang menjangkau segmen pasar wisatawan secara luas maupun <i>segmented</i> sesuai generasi dan peminatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Kominfo Industri	

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi					Tahap 2 Akselerasi					Tahap 3 Perluasan					Tahap 4 Perwujudan Visi					Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
b.	Pengembangan aplikasi wisata berbasis teknologi yang mencakup seluruh kabupaten/ kota di DIY	√			√			√		√		√		√			√		√			Pariwisata	Kominfo Pemkab/ Pemkot
2)	STRATEGI: mengembangkan basis data pemasaran																						
a.	Pengembangan basis data dan intelijensi pasar wisatawan mancanegara dan nusantara berbasis teknologi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Kominfo

D. Arah Kebijakan, Strategi, dan Indikasi Program Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi	Tahap 2 Akselerasi	Tahap 3 Perluasan	Tahap 4 Perwujudan Visi	Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
I.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan kelembagaan pariwisata yang mengkoordinasikan upaya pembangunan pariwisata lintas wilayah-lintas sektor-lintas kepentingan secara sinergis.						
1)	STRATEGI: kelembagaan pariwisata lintas wilayah dan lintas sektor						
a.	Pembentukan Lembaga Pariwisata Daerah yang mengkoordinasikan upaya pembangunan pariwisata	√			√	Pariwisata	Setda
b.	Pengembangan regulasi dan mekanisme kolaborasi di bawah koordinasi Lembaga Pariwisata Daerah	√			√	Pariwisata	Biro Hukum
II.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan regulasi dan mekanisme untuk mengembangkan ekosistem pariwisata yang terdiri dari semua pemangku kepentingan kepariwisataan.						
1)	STRATEGI: mengembangkan kemitraan dengan PENTAHELIX						
a.	Pembentukan forum ekosistem pariwisata (semua unsur PENTAHELIX) yang mendorong dan mengakselerasi pengembangan kepariwisataan	√			√	Pariwisata	Mitra Pentahelix
2)	STRATEGI: mengembangkan peran tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk pengembangan pariwisata inklusif						
a.	Pengembangan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) untuk kepariwisataan yang inklusif dan memberi peluang kerja untuk kaum difabilitas	√			√	Pariwisata	Setda
b.	Pengembangan sistem dan pelaksanaan monev efektivitas ekosistem pariwisata dan CSR untuk kepariwisataan yang inklusif dan memberi peluang kerja untuk kaum difabilitas	√			√	Pariwisata	Setda
III.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan kelembagaan industri pariwisata sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan pariwisata						
1)	STRATEGI: mengembangkan kemitraan strategis antara pemerintah dan industri pariwisata						

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi					Tahap 2 Akselerasi					Tahap 3 Perluasan					Tahap 4 Perwujudan Visi					Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
a.	Pembentukan gabungan industri pariwisata daerah yang menjadi wadah bagi asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata, asosiasi Usaha Pariwisata, asosiasi Sumber Daya Manusia Pariwisata, dan asosiasi atau organisasi lain yang terkait langsung dengan Pariwisata.	√					√					√					√					Pariwisata	Industri
b.	Penguatan efektivitas peran asosiasi usaha pariwisata dalam pembangunan pariwisata daerah	√		√		√		√		√			√		√			√		√		Pariwisata	Industri
IV.	ARAH KEBIJAKAN: Penguatan kelembagaan pariwisata berbasis masyarakat yang mendukung pembangunan kalurahan/ kelurahan yang sejahtera dan resiliens																						
1)	STRATEGI: mengembangkan desa/ kampung wisata yang mandiri dan berdaya saing internasional dengan mengoptimalkan potensi lokal																						
a.	Pengembangan desa/ kampung wisata mandiri dan berdaya saing internasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Koperasi & UKM
b.	Penguatan sinergi desa/ kampung wisata dengan potensi desa yang lain (dalam kerangka Desa Mandiri Budaya)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Kebudayaan Koperasi & UKM Pemberdayaa n Perempuan
c.	Pengembangan amenitas berstandar internasional untuk mendukung potensi desa wisata	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	PU	Pariwisata Pemberdayaa n Masyarakat dan Kalurahan
2)	STRATEGI: mengembangkan kemitraan strategis desa/ kampung wisata dengan pemangku kepentingan																						
a.	Pengembangan kemitraan desa wisata dengan industri pariwisata	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Industri Pemberdayaa

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	<u>Tahap 1</u> Fondasi					<u>Tahap 2</u> Akselerasi					<u>Tahap 3</u> Perluasan					<u>Tahap 4</u> Perwujudan Visi					Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
																							n Masyarakat dan Kalurahan
b.	Pengembangan kemitraan desa wisata dengan perguruan tinggi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Perguruan Tinggi Pemberdayaa n Masyarakat dan Kalurahan

E. Arah Kebijakan, Strategi, dan Indikasi Program Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi					Tahap 2 Akselerasi					Tahap 3 Perluasan					Tahap 4 Perwujudan Visi					Pemangku kepentingan utama		Pemangku kepentingan terkait	
I.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan SDM pariwisata yang mencakup SDM pemerintah, industri, dan masyarakat, yang: adaptif, kompeten dan berkualitas, menguasai teknologi, dan berwawasan keberlanjutan																								
1)	STRATEGI: mengembangkan pelatihan dan pendampingan SDM Pariwisata yang adaptif, kompeten, berkualitas, menguasai teknologi, dan berwawasan berkelanjutan																								
a.	Pelatihan dan pendampingan SDM pariwisata Pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	BKD			
b.	Pelatihan dan pendampingan SDM di desa/ kampung wisata menuju sertifikasi kompetensi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Industri LSP			
c.	Pelatihan dan pendampingan SDM industri pariwisata menuju sertifikasi kompetensi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Pariwisata	Naker Industri			
2)	STRATEGI: mengembangkan basis data SDM sebagai dasar pengembangan kualitas SDM Pariwisata																								
a.	Pengembangan basis data SDM Pariwisata yang meliputi kuantitas dan tingkat kompetensi SDM Pariwisata Industri	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√	Pariwisata	Kominfo			
b.	Pengembangan basis data SDM Pariwisata yang meliputi kuantitas dan tingkat kompetensi SDM Pariwisata desa/ kampung wisata		√		√		√		√		√		√		√		√		√		Pariwisata	Kominfo			
II.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan regulasi, sistem, dan mekanisme pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata dengan standar internasional																								
1)	STRATEGI: mengembangkan pelatihan dan pendampingan SDM Pariwisata dengan standar internasional untuk kompetensi inti sesuai pekerjaan/ profesi																								
a.	Pelatihan dan pendampingan SDM pariwisata dengan standar internasional sesuai dengan kompetensi sesuai bidang keahlian/ keterampilan sesuai pekerjaan/ profesi	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√	Pariwisata	Naker Industri			

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi					Tahap 2 Akselerasi					Tahap 3 Perluasan					Tahap 4 Perwujudan Visi					Pemangku kepentingan utama		Pemangku kepentingan terkait	
2)	STRATEGI: mengembangkan pelatihan dan pendampingan SDM Pariwisata untuk kompetensi khusus																								
a.	Pelatihan dan pendampingan SDM pariwisata dengan standar internasional untuk <i>sustainable tourism development</i>	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		Pariwisata	Naker LH Industri		
b.	Pelatihan dan pendampingan SDM pariwisata dengan standar internasional untuk kemampuan mengadopsi teknologi	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		Pariwisata	Kominfo Naker Industri		
c.	Pelatihan dan pendampingan SDM pariwisata untuk penguasaan materi keistimewaan dan intepretasi budaya	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		Pariwisata	Kebudayaan		
III.	ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan kerjasama strategis dengan institusi pendidikan untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata																								
1)	STRATEGI: mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan untuk mengembangkan model dan materi pelatihan/ pendampingan SDM Pariwisata untuk keterampilan/ kompetensi sesuai pekerjaan/ profesi																								
a.	Pengembangan model dan materi pelatihan dan pendampingan SDM pariwisata dengan standar internasional untuk kompetensi sesuai bidang keahlian/ keterampilan tertentu		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√	Pariwisata	Perguruan Tinggi (PT) Naker LSP Industri		
2)	STRATEGI: mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan untuk mengembangkan model/ materi/ metode pelaksanaan pelatihan/ pendampingan SDM Pariwisata untuk keterampilan/ kompetensi khusus																								
a.	Pengembangan model dan materi pelatihan dan pendampingan SDM pariwisata dengan standar internasional untuk kompetensi <i>sustainability tourism</i>		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√	Pariwisata	PT LH LSP		

	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM	Tahap 1 Fondasi					Tahap 2 Akselerasi					Tahap 3 Perluasan					Tahap 4 Perwujudan Visi					Pemangku kepentingan utama	Pemangku kepentingan terkait
																							Industri
b.	Pengembangan model dan materi pelatihan dan pendampingan SDM pariwisata dengan standar internasional untuk kompetensi adopsi teknologi dalam kepariwisataan	√		√		√	√		√		√	√	√	√	√	√	√	√				Pariwisata	PT Kominfo Naker LSP Industri
c.	Pengembangan model dan materi pelatihan dan pendampingan SDM pariwisata untuk penguasaan materi keistimewaan dan intepretasi budaya DIY		√		√		√		√		√	√	√	√	√	√	√	√				Pariwisata	PT Kebudayaan LSP Industri
d.	Kemitraan dengan institusi pendidikan untuk akselerasi pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi SDM Pariwisata		√		√		√		√		√	√	√	√	√	√	√	√				Pariwisata	PT Naker LSP

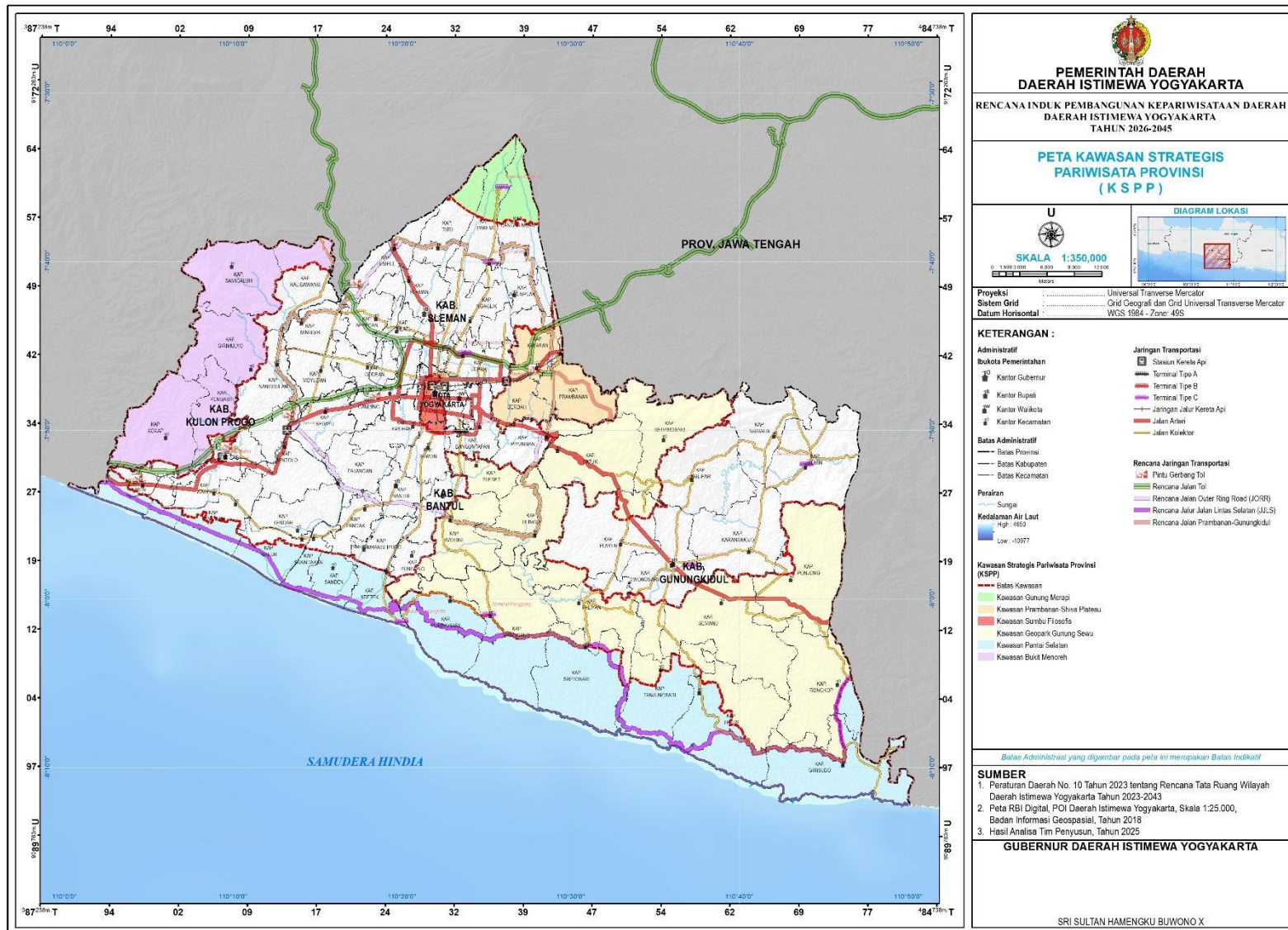
LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAN DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
 2026-2045

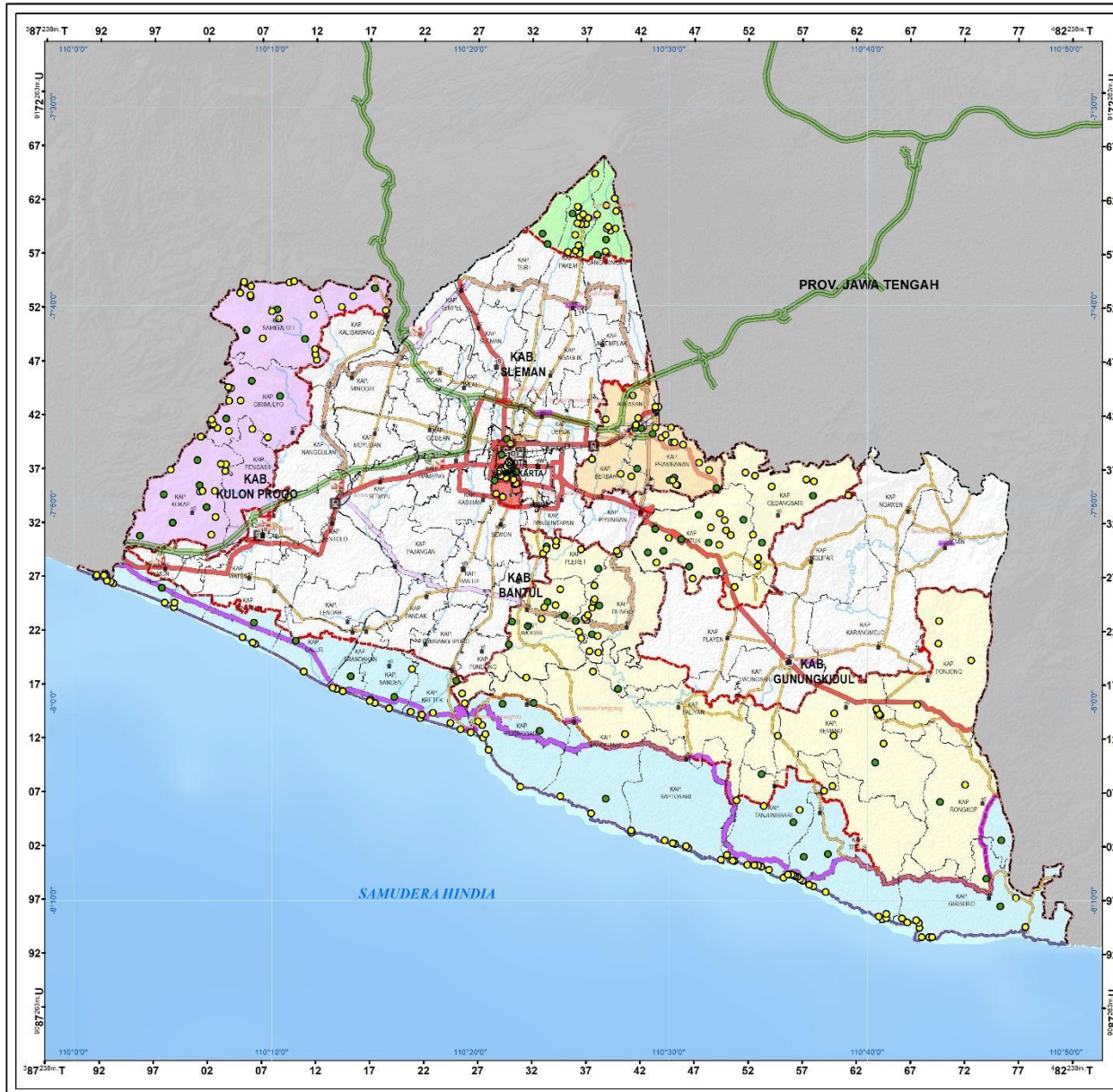
PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN 6 (ENAM) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)

A. JABARAN 6 (ENAM) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)

NO	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)	WILAYAH ADMINISTRATIF
1	KSPP Kawasan Gunung Merapi	Kabupaten Sleman
2	KSPP Kawasan Prambanan-Shiva Plateau	Kabupaten Sleman
3	KSPP Kawasan Sumbu Filosofis	Kota Yogyakarta; Kabupaten Bantul
4	KSPP Kawasan Geopark Gunung Sewu	Kabupaten Bantul; Kabupaten Gunungkidul
5	KSPP Kawasan Pantai Selatan	Kabupaten Gunungkidul; Kabupaten Bantul; Kabupaten Kulon Progo
6	KSPP Kawasan Bukit Menoreh	Kabupaten Kulon Progo

B. PETA SEBARAN 6 (ENAM) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA INDIK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2026-2045

PETA DAYA TARIK WISATA (DTW) DAN DESA/KAMPUNG WISATA PADA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (K S P P)

U



SKALA 1:350,000



DIAGRAM LOKASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grd Geografis dan Grd Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 1984 - Zone: 48S

KETERANGAN :

Administratif

ibukota Pemerintahan

Kantor Gubernur

Kantor Bupati

Kantor Walikota

Kantor Kecamatan

Batas Administratif

Batas Provinsi

Batas Kabupaten

Batas Kecamatan

Batas Desa

Batas Kelurahan

Batas Desa

Batas Kelurahan

Batas Desa

Batas Kelurahan

Batas Desa

Batas Kelurahan

Batas Desa

Batas Kelurahan

Batas Desa

Batas Kelurahan

Batas Desa

Batas Kelurahan

Batas Desa

Batas Kelurahan

Batas Desa

Batas Kelurahan

Batas Desa

Batas Kelurahan

Batas Desa

Batas Kelurahan

Batas Desa

Batas Kelurahan

Batas Desa

Batas Kelurahan

Batas Desa

Batas Kelurahan

Batas Desa

Batas Kelurahan

Batas Desa

Batas Kelurahan

Batas Desa

Batas Kelurahan

Batas Desa

Batas Kelurahan

Jaringan Transportasi

Stasiun Kereta Api

Terminal Tipe A

Terminal Tipe B

Terminal Tipe C

Jaringan Jalan Keresia Api

Jalan Arteri

Jalan Kolektor

Jalan Lokal

Jalan Perantara

Jalan Lingkungan

Jalan Pedestrian

Jalan Sepeda

Jalan Pejalan Kaki

Jalan Transpor

Jalan Parkir

Jalan Pengantar

Jalan Penghubung

Jalan Pengkalan

Jalan Pengalihan

Jalan Pengantar

Jalan Penghubung

Jalan Pengkalan

Jalan Pengalihan

Jalan Pengantar

Jalan Penghubung

Jalan Pengkalan

Jalan Pengalihan

Jalan Pengantar

Jalan Penghubung

Jalan Pengkalan

Jalan Pengalihan

Jalan Pengantar

Jalan Penghubung

Jalan Pengkalan

Jalan Pengalihan

Jalan Pengantar

Jalan Penghubung

Jalan Pengkalan

Jalan Pengalihan

Jalan Pengantar

Jalan Penghubung

Jalan Pengkalan

Jalan Pengalihan

Jalan Pengantar

Jalan Penghubung

Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP)

Batas Kawasan

Kawasan Gunung Merapi

Kawasan Prambanan-Shiva Plateau

Kawasan Sumbu Filosofi

Kawasan Geopark Gunung Sewu

Kawasan Pantai Selatan

Kawasan Bukit Menoreh

Kawasan Pantai Utara

Kawasan Pantai Timur

Kawasan Pantai Barat

Kawasan Pantai Selatan

Kawasan Pantai Utara

Kawasan Pantai Timur

Kawasan Pantai Barat

Kawasan Pantai Selatan

Kawasan Pantai Utara

Kawasan Pantai Timur

Kawasan Pantai Barat

Kawasan Pantai Selatan

Kawasan Pantai Utara

Kawasan Pantai Timur

Kawasan Pantai Barat

Kawasan Pantai Selatan

Kawasan Pantai Utara

Kawasan Pantai Timur

Kawasan Pantai Barat

Kawasan Pantai Selatan

Kawasan Pantai Utara

Kawasan Pantai Timur

Batas Administrasi yang digambarkan pada peta ini merupakan Batas Indikatif

SUMBER

- Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043
- Peta RBI Digital POI Daerah Istimewa Yogyakarta, Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2018
- Hasil Analisa Tim Penyusun, Tahun 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

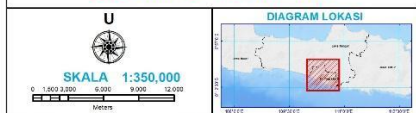
SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2026-2045**

**PETA KAWASAN STRATEGIS
PARIWISATA PROVINSI (KSPP) DAN
GEOPARK D.I. YOGYAKARTA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 1984 - Zone 49S

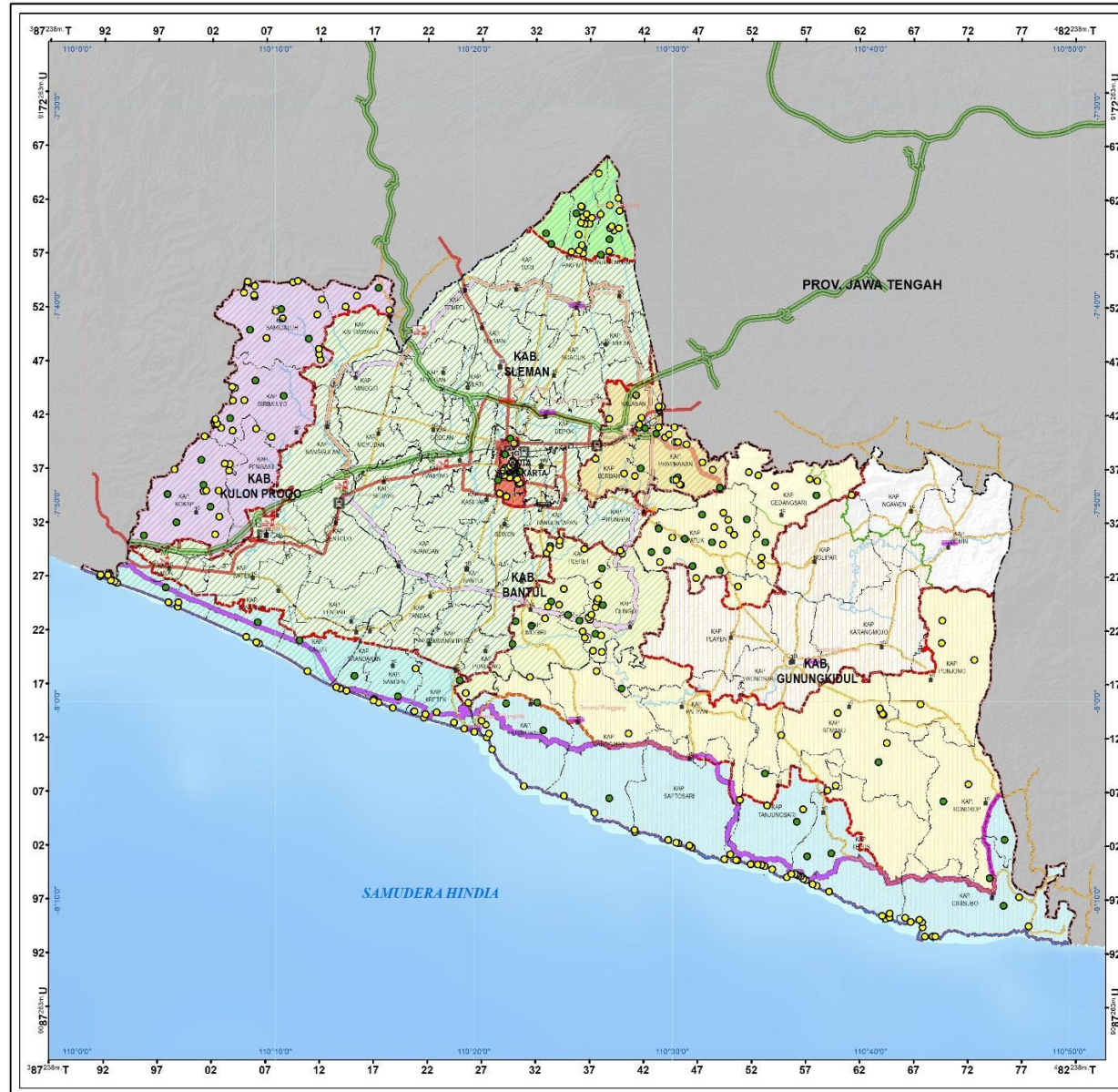
- KETERANGAN :**
- | | |
|---|--------------------------------------|
| Administratif | Jaringan Transportasi |
| Kantor Pemerintahan | Stasiun Kereta Api |
| Kantor Bupati | Terminal Tipe A |
| Kantor Walikota | Terminal Tipe B |
| Kantor Kecamatan | Terminal Tipe C |
| Batas Administratif | Jaringan Jalan Kereta Api |
| Batas Provinsi | Jalan Arteri |
| Batas Kabupaten | Jalan Kolektor |
| Batas Kecamatan | Rencana Jaringan Transportasi |
| Perairan | Pintu Gerbang Tol |
| Sungai | Rencana Jalan Outer Ring Road (JORR) |
| Kedalaman Air Laut | Rencana Jalan Lintas Selatan (JALS) |
| High -1000 | Rencana Jalan Prambanan-Gunungkidul |
| Low -1007 | |
| Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) | |
| Kawasan Gunung Merapi | |
| Kawasan Prambanan-Shiva Plateau | |
| Kawasan Sumbu Filosofi | |
| Kawasan Geopark Gunung Sewu | |
| Kawasan Pantai Selatan | |
| Kawasan Bukit Menoreh | |
| Geopark Daerah Istimewa Yogyakarta | |
| Geopark Gunungsewu | |
| Geopark Jogja | |

Batas Administrasi yang digambarkan pada peta ini merupakan Batas Indikatif

- SUMBER**
- Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043
 - Peta RBI Digital, POI Daerah Istimewa Yogyakarta, Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2018
 - Hasil Analisa Tim Penyusun, Tahun 2025

GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

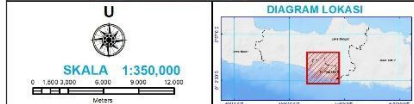
SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2026-2045

PETA DAYA TARIK WISATA (DTW) DAN DESA/KAMPUNG WISATA PADA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP) DAN GEOPARK D.I. YOGYAKARTA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 1984 - Zone 49S

KETERANGAN :	
Administratif	Jaringan Transportasi
Kabupaten	Stasiun Kereta Api
Kantor Gubernur	Terminal Tipe A
Kantor Bupati	Terminal Tipe B
Kantor Walikota	Terminal Tipe C
Kantor Kecamatan	Jembatan
Batas Administratif	Jalan Arteri
Batas Provinsi	Jalan Kolektor
Batas Kabupaten	Rencana Jaringan Transportasi
Batas Kecamatan	Pintu Gerbang Tol
Perairan	Rencana Jalan Outer Ring Road (JORR)
Sungai	Rencana Jalan Lintas Selatan (JLS)
Kedalaman Air Laut	Rencana Jalan Prambanan-Gunungkidul
High -1000	
Low -1007	
Daya Tarik Wisata	
Daya Tarik Wisata (DTW)	
Desa/Kampung Wisata	
Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP)	
Batas Kawasan	
Kawasan Gunung Merapi	
Kawasan Prambanan-Shiva Plateau	
Kawasan Sumbu Filosofi	
Kawasan Geopark Gunung Sewu	
Kawasan Pantai Selatan	
Kawasan Bukit Menoreh	
Geopark Daerah Istimewa Yogyakarta	
Geopark Gunungsewu	
Geopark Jogja	

Batas Administrasi yang digambarkan pada peta ini merupakan Batas Indikatif

- SUMBER**
- Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043
 - Peta RBI Digital, POI Daerah Istimewa Yogyakarta, Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2018
 - Hasil Analisa Tim Penyusun, Tahun 2025

GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X

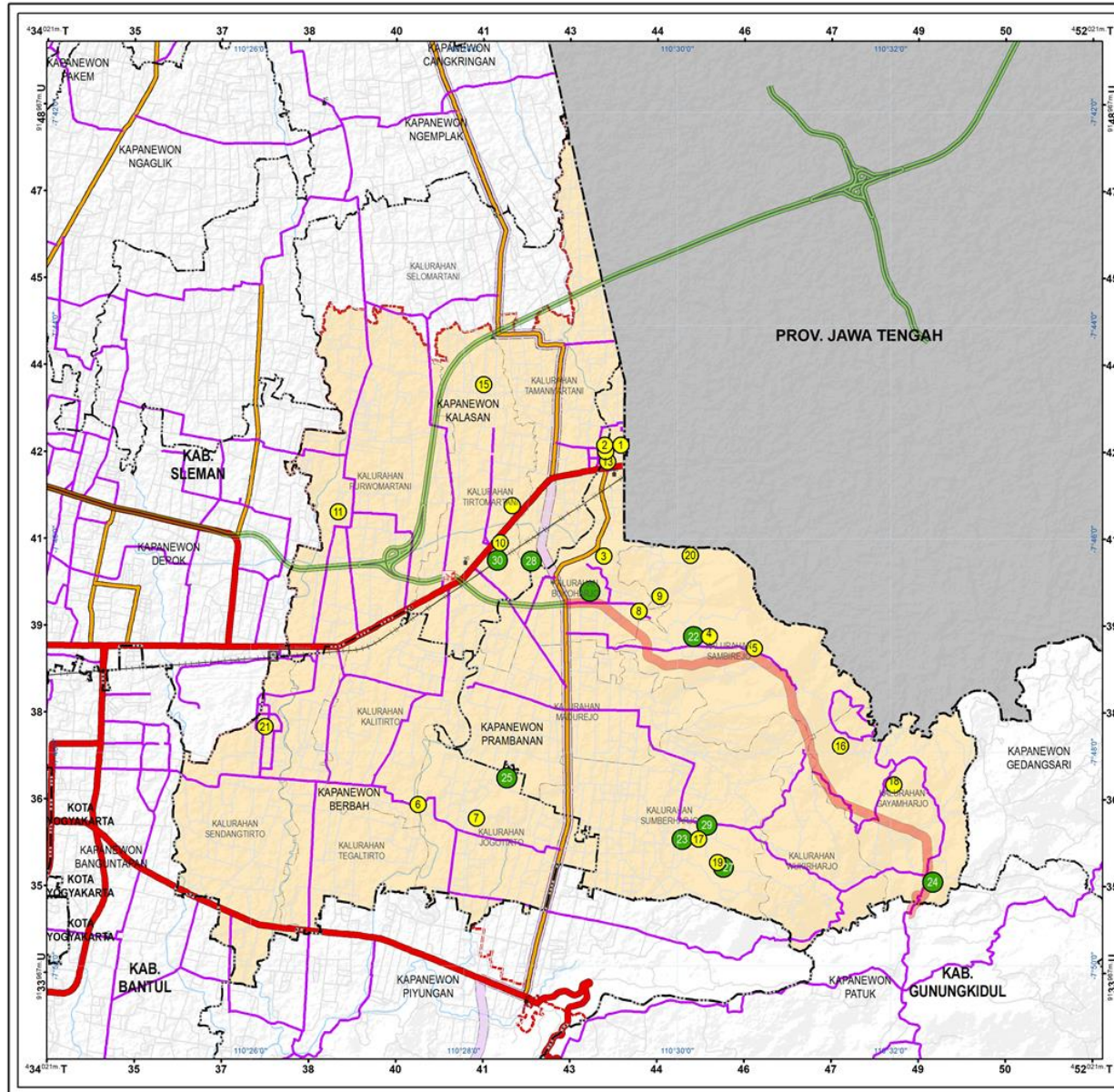
C. PETA DETAIL 6 (ENAM) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP) DAN DAYA TARIK WISATA (DTW)

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)	WILAYAH ADMINISTRATIF	DAYA TARIK WISATA (DTW)
1.	KSPP Kawasan Gunung Merapi	Kabupaten Sleman	1. Taman Nasional Gunung Merapi
			2. Bukit Klangon
			3. Bunker Kaliadem
			4. Bukit Turgo
			5. Makam Syeh Jumadil Kubro di Bukit Turgo
			6. Teras Merapi
			7. Kompleks Batuan Merapi Tua Turgo Plawangan Pakem
			8. Volcano Tour
			9. Gardu Pandang Kaliurang
			10. Tlogo Putri Kaliurang
			11. Museum Ullen Sentalu
			12. Taman Rekreasi Anak Kaliurang
			13. Museum Gempa Prof. Dr. Sarwidi
			14. Hutan Wisata Kaliurang
			15. Museum Mini Sisa Hartaku
			16. Stonehenge Merapi
			17. Batu Alien
			18. The Lost World Castle

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)	WILAYAH ADMINISTRATIF	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			19. Suraloka Zoo
			20. Museum Gunungapi Merapi
			21. The World Landmarks Merapi Park
			22. Merapi Golf
			23. Museum Anak Bajang/Omah Petruk
			24. Satoloka
			25. Desa Wisata Nganggring
			26. Desa Wisata Turgo-Merapi
			27. Desa Wisata Tegal Loegood
			28. Desa Wisata Kembangarum
			29. Desa Wisata Huntap Pagerjuran
			30. Desa Wisata Ledok Balong
			31. Desa Wisata Batur Berdikari

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
2.	KSPP Kawasan Pambanan-Shiva Plateau	Kabupaten Sleman	1. Candi Prambanan
			2. Sendratari Ramayana
			3. Kraton Ratu Boko
			4. Tebing Breksi
			5. Candi Ijo
			6. Lava Bantal Berbah
			7. Candi Abang
			8. Candi Banyunibo
			9. Candi Barong
			10. Candi Kalasan
			11. Candi Sambisari
			12. Candi Sari
			13. Museum Purbakala Taman Wisata Prambanan
			14. Gedung Kesenian Trimurti
			15. Candi Kedulan
			16. Sendang Sriningsih
			17. Rumah Domes
			18. Bukit Mintorogo
			19. Rayapan Tanah Ngelepen

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			20. Spot Riyadi
			21. Museum Karbol
			22. Desa Wisata Sambirejo Breksi
			23. Desa Wisata Rumah Dome
			24. Desa Wisata Nawung
			25. Desa Wisata Pengklik
			26. Desa Wisata Budaya Plempoh
			27. Desa Wisata Bukit Teletubbies
			28. Desa Wisata Wisata Bukit Mintorogo
			29. Desa Wisata Pereng "Abyudaya
			30. Desa Wisata Umbul Sidomulyo Kalasan





**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2026-2045

**PETA DAYA TARIK WISATA (DTW) DAN
DESA/KAMPUNG WISATA PADA
KSPP KAWASAN PRAMBANAN-SHIVA PLATEAU**



SKALA 1:65.000

DIAGRAM LOKASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografik dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS 1984 - Zone: 49S

KETERANGAN :

Administratif - Kantor Gubernur - Kantor Bupati - Kantor Walikota - Kantor Kecamatan Batas Administratif - Batas Provinsi - Batas Kabupaten - Batas Kecamatan - Batas Desa Perairan - Sungai Kedalaman Air Laut - High - 4850 - Low - 10977 Daya Tarik Wisata - Daya Tarik Wisata (DTW) - Desa/Kampung Wisata Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) - Batas Kawasan - Kawasan Prambanan-Shiva Plateau	Jaringan Transportasi - Stasiun Kereta Api - Terminal Tipe A - Terminal Tipe B - Terminal Tipe C - Jaringan Jalur Kereta Api - Jalan Arteri - Jalan Kolektor - Jalan Lokal - Jalan Lain Rencana Jaringan Transportasi - Pintu Gerbang Tol - Rencana Jalan Tol - Rencana Jalan Outer Ring Road (JORR) - Rencana Jalan Lintas Selatan (JLS) - Rencana Jalan Prambanan-Gunungkidul
--	---

Batas Administrasi yang digambar pada peta ini merupakan Batas Indikatif

SUMBER

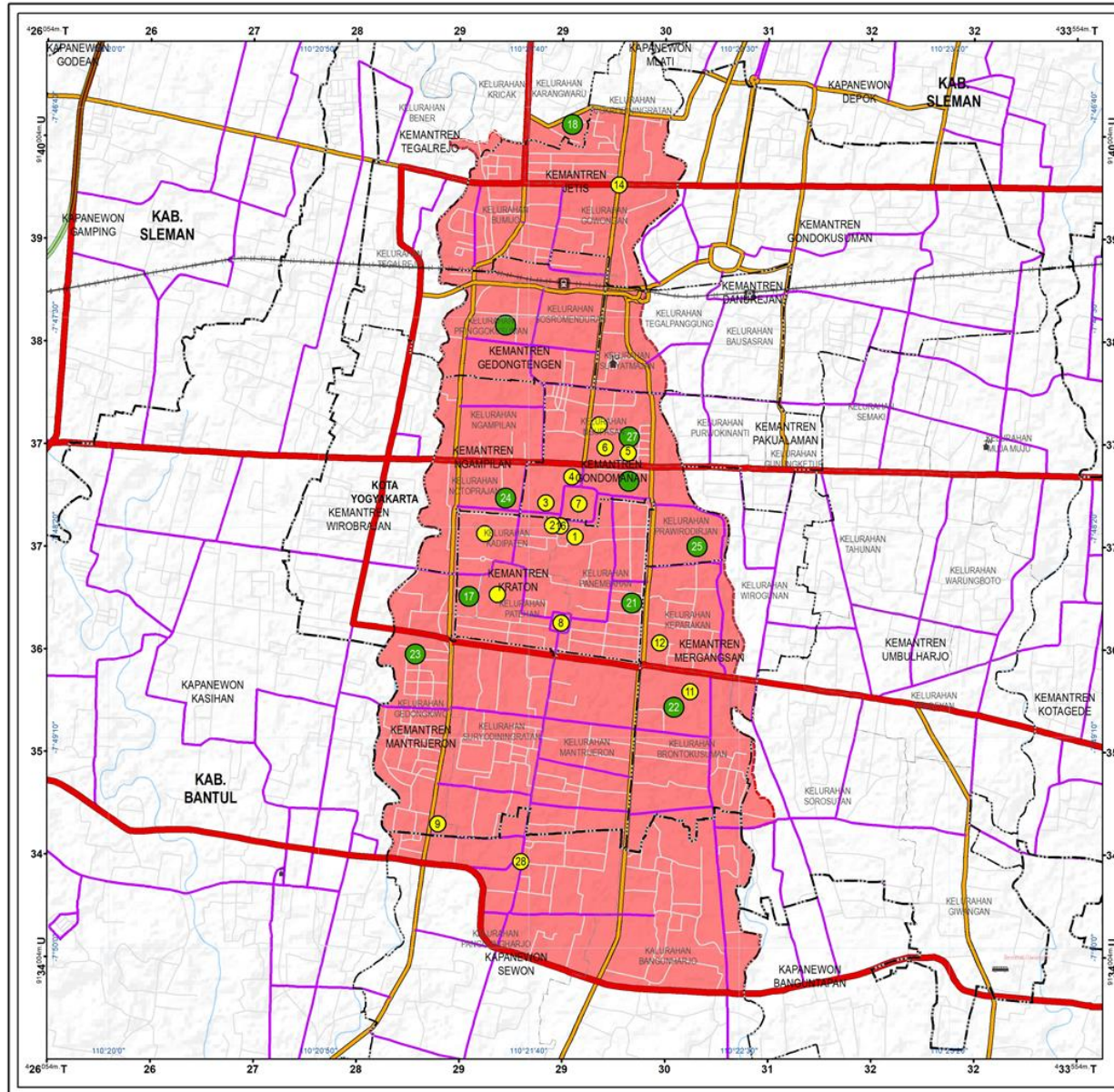
1. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043
2. Peta RBI Digital, POI Daerah Istimewa Yogyakarta, Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2018
3. Hasil Analisa Tim Penyusun, Tahun 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
3.	KSPP Kawasan Sumbu Filosofis	Kota Yogyakarta	1. Kraton
			2. Museum Kereta Kraton
			3. Masjid Gedhe Kauman
			4. Museum Sonobudoyo
			5. Taman Pintar
			6. Museum Benteng Vredeburg
			7. Alun-alun Utara
			8. Alun-alun Selatan
			9. Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)
			10. Tamansari
			11. Museum Perjuangan
			12. Ndalem Pujokusuman
			13. Ndalem Mangkubumen
			14. Tugu Pal Putih
			15. Pasar Beringharjo
			16. Wahanarata
			17. Kampung Wisata Taman Sari
			18. Kampung Wisata Cokrodiningratan
			19. Kampung Wisata Sosromenduran

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			20. Kampung Wisata Sayidan
			21. Kampung Wisata Dipowinatan
			22. Kampung Wisata Dewabronto
			23. Kampung Wisata Sekar Niti
			24. Kampung Wisata Kauman
			25. Kampung Wisata Sura Amerta (Surokarsan)
			26. Kampung Wisata Ratmakan
			27. Kampung Wisata Suryatmajan
		Kabupaten Bantul	28. Panggung Krapyak





**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2026-2045

**PETA DAYA TARIK WISATA (DTW) DAN
DESA/KAMPUNG WISATA PADA
KSPP KAWASAN SUMBU FILOSOFIS**



SKALA 1:27.500



DIAGRAM LOKASI

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografik dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 1984 - Zone: 49S

KETERANGAN :

Administratif  Ibukota Pemerintahan  Kantor Gubernur  Kantor Bupati  Kantor Walikota  Kantor Kecamatan Batas Administratif  Batas Provinsi  Batas Kabupaten  Batas Kecamatan  Batas Desa Perairan  Sungai  Kedalaman Air Laut  High - 4850  Low - 10977 Daya Tarik Wisata  Daya Tarik Wisata (DTW)  Desa/Kampung Wisata Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP)  Batas Kawasan  Kawasan Sumbu Filosofi	Jaringan Transportasi  Stasiun Kereta Api  Terminal Tipe A  Terminal Tipe B  Terminal Tipe C  Jaringan Jalur Kereta Api  Jalan Arteri  Jalan Kolektor  Jalan Lokal  Jalan Lain Rencana Jaringan Transportasi  Pintu Gerbang Tol  Rencana Jalan Tol  Rencana Jalan Outer Ring Road (JORR)  Rencana Jalan Lintas Selatan (JLS)
--	--

Batas Administrasi yang digambar pada peta ini merupakan Batas Indikatif

SUMBER

1. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043
2. Peta RBI Digital POI Daerah Istimewa Yogyakarta, Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2018
3. Hasil Analisa Tim Penyusun, Tahun 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X

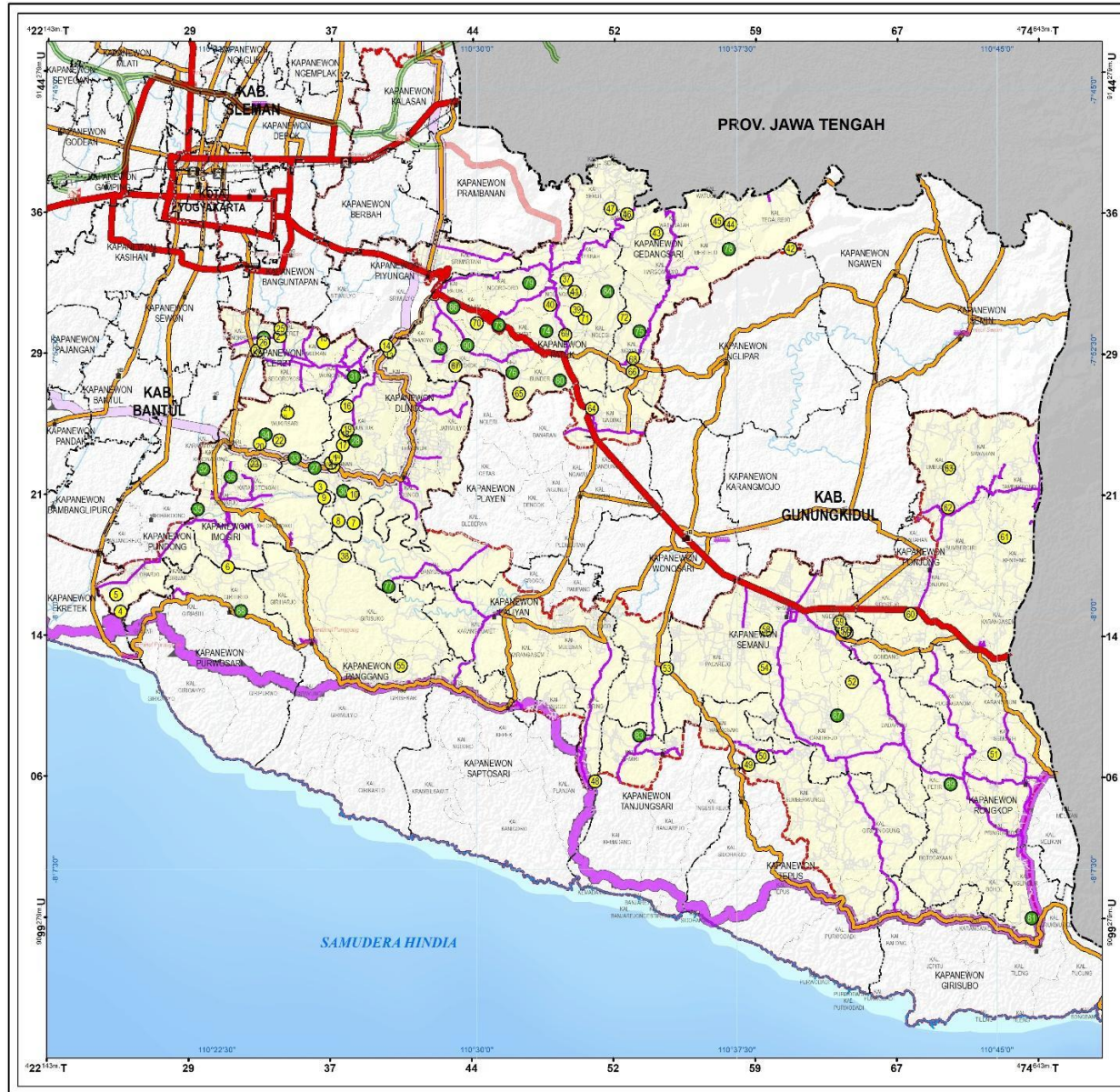
NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
4.	KSPP Geopark Gunung Sewu	Kabupaten Bantul	1. Hutan Pinus Mangunan Dlingo
			2. Lava Purba Mangunan
			3. Kebun Buah Mangunan
			4. Gua Jepang
			5. Situs Surocolo/Gua Sunan Mas
			6. Gua Cerme
			7. Bukit Panguk Kediwung
			8. Bukit Mojo
			9. Selopamioro Adventure park
			10. Gua Gajah Lemah Abang
			11. Seribu Batu Songgo Langit
			12. Museum Purbakala Pleret
			13. Gunung Mungker
			14. Gunung Pengger
			15. Puncak Sosok
			16. Puncak Becici
			17. Pinus Asri
			18. Lintang 1000
			19. Pintoe Langit Dahromo

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			20. Makam Raja-raja Imogiri
			21. Kerajinan Wayang Kulit
			22. Batik Tulis Sidomukti
			23. Kerajinan Keris
			24. Masjid Pathok Negara Wonokromo
			25. Situs Pleret
			26. Cagar Budaya Situs Kerto Keraton Sultan Agung
			27. Desa Wisata Kaki Langit
			28. Desa Wisata Karangasem
			29. Desa Wisata Bumi Mataram Pleret
			30. Desa Wisata Goa Gajah (Lemah Abang)
			31. Desa Wisata Banyunibo Rejosari
			32. Desa Wisata Kebonagung
			33. Desa Wisata Tapak Tilas Sultan Agung
			34. Desa Wisata Wukirsari
			35. Desa Wisata Taman Girli Indah
			36. Desa Wisata Karangtengah
		Kabupaten Gunungkidul	37. Gunung Nglanggeran
			38. Geoforest Watu Payung Turunan

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			39. Air Terjun Banyunibo
			40. Air Terjun Kedung Kandang
			41. Embung Nglanggeran
			42. Puncak Sumilir
			43. Gunung Beduk
			44. Air Terjun Yonan
			45. Green Village Gedangsari
			46. Air Terjun Luweng Sampang
			47. Taman Maria Giri Wening
			48. Gua Maria Tritis
			49. Gua Ngrapah
			50. Wisata Alam Goa Bentar Jrakah
			51. Gua Braholo Karangmojo
			52. Gua Bribin
			53. Gua Ngingrong
			54. Gua Jomblang
			55. Petilasan Kembang Lampir
			56. Gua Jlamprong
			57. Embung Jelangprong

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			58. Kali Suci
			59. Kawasan Mojo Ngeposari
			60. Gua Tapan
			61. Gua Song Gilap Anjani Kenteng
			62. Bendungan Simo/ Dam Beton
			63. Gua Plalar
			64. Tahura Bunder
			65. Telaga Kemuning
			66. Bioturbasi Kali Ngalang
			67. Gunung Ireng
			68. Nyadran Gubug Gede
			69. Kampung Emas Plumbungan
			70. Purbaselo Nawing Indah
			71. Joglo Batur
			72. Gunung Gentong
			73. Desa Wisata Nglanggeran
			74. Desa Wisata Putat
			75. Desa Wisata Ngalang
			76. Desa Wisata Jelok Beji

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			77. Desa Wisata Girisuko
			78. Desa Wisata Mertelu
			79. Desa Wisata Ngoro-oro
			80. Desa Wisata Bunder
			81. Desa Wisata Jerukwudel
			82. Desa Wisata Ngeposari
			83. Desa Wisata Kemadang
			84. Desa Wisata Pilangrejo
			85. Desa Wisata Semoyo
			86. Desa Wisata Salam
			87. Desa Wisata Candirejo
			88. Desa Wisata Giritirto
			89. Desa Wisata Petir
			90. Desa Wisata Pengkok

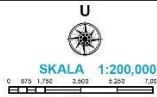




**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**RENCANA INDIK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2026-2045**

**PETA DAYA TARIK WISATA (DTW) DAN
DESA/KAMPUNG WISATA PADA
KSPPP KAWASAN GEOPARK GUNUNG SEWU**



SKALA 1:200,000



DIAGRAM LOKASI

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS 1984 - Zone 49S

KETERANGAN :

Administratif - Ibukota Pemerintahan - Kantor Gubernur - Kantor Bupati - Kantor Walikota - Kantor Kecamatan Batas Administratif - Batas Provinsi - Batas Kabupaten - Batas Kecamatan - Batas Desa Perairan - Sungai Kedalaman Air Laut - High - 4850 - Low - 10077 Daya Tarik Wisata - Daya Tarik Wisata (DTW) - Desa/Kampung Wisata Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPPP) - Batas Wilayah - Kawasan Geopark Gunung Sewu	Jaringan Transportasi - Stasiun Kereta Api - Terminal Tipe A - Terminal Tipe B - Terminal Tipe C - Jaringan Jalan Kereta Api - Jalan Arteri - Jalan Kolektor - Jalan Lokal - Jalan Lain Rencana Jaringan Transportasi - Pintu Gerbang Tol - Rencana Jalan Tol - Rencana Jalan Outer Ring Road (JORR) - Rencana Jalur Jalan Lintas Selatan (JLS) - Rencana Jalan Prembanten-Gunungkidul
--	--

Batas Administrasi yang digambarkan pada peta ini merupakan Batas Indikatif

SUMBER

1. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043
2. Peta RBI Digital POI Daerah Istimewa Yogyakarta, Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2018
3. Hasil Analisa Tim Penyusun, Tahun 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
5.	KSPP Kawasan Pantai Selatan	Kabupaten Gunungkidul	1. Pantai Ngungguh
			2. Pantai Bekah
			3. Gua Langse
			4. Pantai Parangendog
			5. Watugupit (Paralayang)
			6. Sendang Beji
			7. Situs Gembirowati
			8. Pesangrahan Gembirawati
			9. Pantai Greweng
			10. Pantai Jungwok
			11. Pantai Sedahan
			12. Pantai Wediombo
			13. Pantai Sadeng
			14. Gunungapi Purba Siung Batur Wediombo
			15. Pantai Watu Lumbung
			16. Pantai Nampu
			17. Pantai Nglambor
			18. Gunung Batur

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			19. Pantai Siung
			20. Pantai Jogan
			21. Gua Senen
			22. Bengawan Solo Purba
			23. Pantai Seruni
			24. Pantai Pok Tunggal
			25. Pantai Watu Lawang
			26. Pantai Pulangsawal
			27. Pantai Somandeng
			28. Pantai Sarangan
			29. Pantai Sundak
			30. Pantai Ngandong
			31. Pantai Sadranan
			32. Pantai Slili
			33. Pantai Krakal
			34. Bukit Kosakora
			35. Pantai Drini
			36. Pantai Watu Kodok

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			37. Pantai Sanglen
			38. Pantai Sepanjang
			39. Pantai Kukup
			40. Pantai Ngrawe
			41. Baron Agro Forestry Technopark
			42. Pantai Baron
			43. Pantai Torohudan
			44. Pantai Ngrenehan
			45. Pantai Ngobaran
			46. Pantai Nguyahan
			47. Pantai Ngedan
			48. Pantai Buron
			49. Pantai Gesing
			50. Pantai Grigak
			51. Ekowisata Tritis
			52. Gua Grengseng
			53. Desa Wisata Ngestirejo
			54. Desa Wisata Sidoharjo

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			55. Desa Wisata Tepus
			56. Desa Wisata Melikan
			57. Desa Wisata Giripurwo
			58. Desa Wisata Giriasih
			59. Desa Wisata Girikarto
			60. Desa Wisata Pucung
			61. Desa Wisata Giricahyo
		Kabupaten Bantul	62. Pantai Parangtritis
			63. Pantai Parangkusumo
			64. Gumuk Pasir
			65. Pantai Depok
			66. Laguna Depok Parangtritis
			67. Museum Gumuk Pasir (Geomaritime Sains Park)
			68. Mangrove Baros
			69. Kawasan Mangrove Pantai Baros
			70. Pantai Samas
			71. Pantai Pandasari
			72. Pantai Goa Cemara

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			73. Pantai Kuwaru
			74. Pantai Baru
			75. Pantai Pandansimo
			76. Kergan Kampung Gurami
			77. Desa Wisata Kampung Surocolo
			78. Desa Wisata Laguna Depok
			79. Desa Wisata Kregan Kampung Gurami
			80. Desa Wisata Pandansari
			81. Desa Wisata Patihan Goa Cemara
		Kabupaten Kulon Progo	82. Pantai Trisik
			83. Pantai Bugel
			84. Pantai Bidara
			85. Pantai Mlarangan Asri
			86. Pantai Karangwuni
			87. Pantai Glagah
			88. Pelabuhan Tanjung Adikarto (Karangwuni)
			89. Pantai Congot
			90. Sungai Bogowonto

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			91. Pasir Kadilangu
			92. Pantai Pasir Mendit
			93. Mangrove Jembatan Api-api
			94. Mangrove Wanatirta
			95. Desa Wisata Glagah
			96. Desa Wisata Sawah Surjan
			97. Desa Wisata Banaran Berseri





**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

RENCANA INDIK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2026-2045

**PETA DAYA TARIK WISATA (DTW) DAN
DESA/KAMPUNG WISATA PADA
KSPP KAWASAN PANTAI SELATAN**



U
SKALA 1:335,000

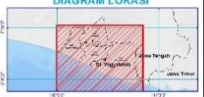


DIAGRAM LOKASI

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 1984 - Zone 49S

KETERANGAN :

Administratif	Jaringan Transportasi
Bukota Pemerintahan	Stasiun Kereta Api
Kantor Bupati	Terminal Tipe A
Kantor Walikota	Terminal Tipe B
Kantor Kecamatan	Terminal Tipe C
Batas Administratif	Jaringan Jalur Kereta Api
Batas Provinsi	Jalan Arter
Batas Kabupaten	Jalan Kolektor
Batas Kecamatan	Jalan Lokal
Batas Desa	Jalan Lain
Perairan	Rencana Jaringan Transportasi
Sungai	Pintu Gerbang Tol
Kedalaman Air Laut	Rencana Jalan Tol
High : 400	Rencana Jalan Outer Ring Road (JORR)
Low : -1000	Rencana Jalur Lintas Selatan (JLS)
Daya Tarik Wisata	
Daya Tarik Wisata (DTW)	
Desa/Kampung Wisata	
Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP)	
Batas Wilayah	
Kawasan Pantai Selatan	

Batas Administrasi yang digambarkan pada peta ini merupakan Batas Indikatif

SUMBER

- Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043
- Peta RBI Digital POI Daerah Istimewa Yogyakarta, Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2018
- Hasil Analisa Tim Penyusun, Tahun 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
6.	KSPP Kawasan Bukit Menoreh	Kabupaten Kulonprogo	1. Mangan Kliripan-Karangsari
			2. Gunung Kuniran
			3. Pusat Penyelamatan Satwa
			4. Panorama Setro
			5. Waduk Sermo
			6. Mengger Kemuning Waduk Sermo
			7. Kalibiru
			8. Gunung Ijo
			9. Canting Mas
			10. Pule Payung
			11. Embung Kleco
			12. Gunung Gajah
			13. Wisata Alam Kedung Banteng
			14. Talun Ombo
			15. Wisata Alam Kedung Pedhut
			16. Wisata Alam Kembang Soka
			17. Kawasan Jatimulyo
			18. Air Terjun Kembang Soka
			19. Taman Sungai Mudal

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			20. Gua Kiskendo
			21. Gunung Lanang
			22. Gua Kidang Kencono
			23. Ayunan Langit
			24. Puncak Kleco
			25. Rumah Sandi Negara
			26. Gua Sriti
			27. Kawasan Gua Banyu Sumurup
			28. Bunga chrysant di Gerbosari
			29. Embung Sidoharjo
			30. Monumen Bom Samigaluh
			31. Embung Krapyak
			32. Gua Maria Sendangsono
			33. Wisata kopi menoreh
			34. Embung Tonogoro
			35. Perbukitan Widosari
			36. Glamping Menoreh
			37. Kebun Teh Tritis
			38. Puncak Suroloyo

NO.	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)	WILAYAH	DAYA TARIK WISATA (DTW)
			39. Wisata Alam Nglinggo
			40. Gunung Kendil KP
			41. Desa Wisata Jatimulyo
			42. Desa Wisata Nglinggo
			43. Desa Wisata Kalibiru
			44. Desa Wisata Tinalah
			45. Desa Wisata Hargotirto
			46. Desa Wisata Purwosari
			47. Desa Wisata Sermo
			48. Desa Wisata Menoreh
			49. Desa Wisata Banjaroya
			50. Desa Wisata Widosari
			51. Desa Wisata Hargorejo
			52. Desa Wisata Gerbosari
			53. Desa Wisata Hargomulyo
			54. Desa Wisata Pendoworejo

r.